

**SKRIPSI**

**PERAN INDONESIA DI ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)  
DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN PALESTINA PADA  
MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO**



**Oleh**

**Rinjha Deswita Novriani**

**L1A016074**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**



**SKRIPSI**


**PERAN INDONESIA DI ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM  
MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN PALESTINA PADA MASA  
KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO**

Oleh:

**RINJHA DESWITA NOVRIANI  
L1A016074**

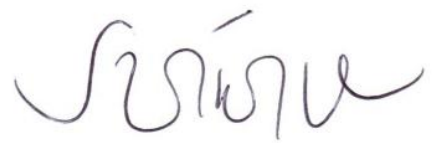
Setelah membaca naskah skripsi ini dengan seksama, maka menurut pertimbangan kami telah memenuhi syarat untuk diujikan

PEMBIMBING I



**Syaiful Anam, S.IP., M.Sc., MIS**  
NIDN. 0016028804

PEMBIMBING II



**Sirwan Yazid Bustami, S.IP., MA.**  
NIDN. 0022129105

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**



**Peran Indonesia di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam  
Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina Pada Masa Kepemimpinan  
Presiden Joko Widodo**

**Disusun oleh :**

**Rinjha Deswita Novriani**

**L1A016074**

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu  
Hubungan Internasional Universitas Mataram pada :

Hari/tanggal : Senin, 08 Mei 2023

Tempat : Ruang Pusat Studi Asean

Pukul : 10.30 WITA

**Tim Penguji**

**Ketua,**

**Syaiful Anam, S.IP., M.Sc., MIS**

NIDN. 0016028804

Penguji I

**Sirwan Yazid Bustami, S.IP., MA.**

NIDN. 0022129105

Penguji II

**Pamungkas Ayudaning Dewanto.**

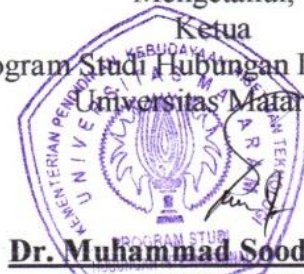
**S.Sos., MA.**

NIDN. 0030128711

Mengetahui,

Ketua

Program Studi Hubungan Internasional  
Universitas Mataram,



**Dr. Muhammad Sood, S.H., M.H**

NIP. 1959100719860310

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rinjha Deswita Novriani

NIM : L1A016074

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Program Studi : Hubungan Internasional


Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

Peran Indonesia di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina Pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Mataram, 30 Mei 2023

  
**Rinjha Deswita Novriani**  
**L1A016074**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERAN INDONESIA DI ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN PALESTINA PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO”**. Adapun Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memenuhi dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram.

Selama proses penyusunan Skripsi ini hingga selesai, penulis mendapatkan banyak bantuan, baik berupa saran, masukan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas semangat, bimbingan dan segala bentuk bantuan yang telah diterima oleh penulis selama proses penyusunan Skripsi ini kepada :

1. Allah SWT yang menjawab segala doa, memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis untuk menghadapi segala rintangan pada saat penyusunan Skripsi berlangsung. Membuat penulis semakin meyakini bahwa Allah SWT menyayangi dan membantu mereka yang selalu berusaha.
2. Kedua orang tua penulis tercinta atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis, baik dukungan materil, spiritual maupun dukungan moril. Terima kasih karena sudah menjadi motivator terbesar penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan staf Tata Usaha Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram yang sudah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Syaiful Anam S.IP., M.Sc selaku dosen pembimbing pertama yang banyak memberikan kemudahan untuk penulis

5. Bapak Sirwan Yazid Bustami, S.IP., MA selaku dosen pembimbing kedua yang banyak memberikan masukan dan pengetahuan untuk penulis
6. Teman-teman HI'16 serta adik-adik tingkat yang selalu memberikan semangat kebaikan, motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan kontribusi berupa saran, motivasi dan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan Skripsi. Akhir kata semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi rujukan dalam menulis penelitian berikutnya.

Mataram, 30 Mei 2023

Rinjha Deswita Novriani

## ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Indonesia melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Sampai saat ini, Palestina masih dijajah oleh Israel sehingga belum mendapatkan kemerdekaannya secara utuh. Indonesia sebagai negara sahabat Palestina selalu berusaha untuk membantu kemerdekaan Palestina. Hal ini bisa dilihat sejak masa pemerintahan presiden pertama Indonesia, Soekarno hingga presiden Joko Widodo. Peran yang lebih dominan oleh para pemimpin Indonesia dalam menanggapi dukungan kepada Palestina lebih banyak berupa dukungan diplomatis seperti pernyataan secara resmi melalui berbagai kegiatan kenegaraan. Hal ini bisa dilihat dari seluruh pemimpin Indonesia yang melakukan tindakan sama berupa pemberian dukungan diplomatis maupun moril dalam berbagai kesempatan untuk menyatakan bahwa Indonesia selalu mendukung Palestina. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran Indonesia di masa pemerintahan presiden Jokowi melalui OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina yaitu mengeluarkan 6 usulan tegas dalam merespon pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem melalui KTT yang diselenggarakan di Turki, diplomasi Indonesia melalui OKI juga berhasil mendorong Palestina untuk mengibatkan benderanya di markas besar PBB untuk pertama kalinya sehingga disinyalir dapat membuka kesempatan negara tersebut untuk menjadi anggota penuh PBB serta sebagai tuan rumah KTT Luar Biasa OKI di Jakarta tanggal 6-7 Maret 2016.

**Kata kunci:** OKI, Joko Widodo, Palestina, Indonesia, diplomasi

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze how Indonesia play roles in the fight for Palestinian independence during President joko widodo's reign. To date, Palestine is still occupied by Israel and has not yet gained its independence. Indonesia as a Palestinian friend state has always tried to help Palestine's independence from president Soekarno until president Joko Widodo reign. More dominant role of Indonesian leaders in responding to support of Palestine is diplomatic support comes in form of diplomacy, such as official statements through many state activities. This can be seen from all Indonesian leaders who are doing the same thing by providing both diplomatic and moral support in various opportunities to declare that Indonesia has always supported Palestine. The study used the concepts of diplomacy in combination with descriptive-qualitative research methods. Research shows Indonesia's role during the reign of President Jokowi through OIC in the fight for independence of the Palestinians by issuing 6 strong proposals in response to the Israeli capital's transfer to Jerusalem through a summit held in Turkey, Indonesian diplomacy through OIC has also prompted Palestine to mention its flags at UN headquarters for the first time that it has allegedly opened the country's opportunity to become a full member of the United Nations and to host the oak-based summit in Jakarta on March 6-7, 2016.*

**Key words:** *OIC, joko widodo, Palestine, Indonesia, diplomacy*



## DAFTAR ISI

<b>COVER JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Akademis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kerangka Pemikiran .....	18
2.3 Alur Pemikiran .....	23
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>24</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Pendekatan Penelitian .....	24
3.3 Variabel Penelitian, Tingkat Analisis dan Tipe Analisis .....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.5 Jenis Data .....	28
3.6 Ruang Lingkup Penelitian .....	28
3.6.1 Ruang Lingkup Materi .....	28

3.6.2 Ruang Lingkup Waktu .....	29
3.7 Teknik Analisis Data .....	29
3.7.1 Pengumpulan Data .....	29
3.7.2 Reduksi Data .....	30
3.7.3 Penyajian Data .....	30
3.7.4 Penarikan Kesimpulan .....	30
3.8 Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Sejarah Konflik Israel dan Palestina .....	33
4.2 Sejarah Terbentuknya OKI.....	37
4.3 Peran Indonesia di OKI Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina .....	41
4.3.1 Peran Pemimpin Indonesia Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina Sebelum Pemerintahan Presiden Joko Widodo .....	42
4.3.2 Peran Presiden Joko Widodo Melalui OKI Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
UDHR	: Universal Declaration of Human Right
OKI	: Organisasi Kerjasama Islam
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1. Isi surat Deklarasi Balfour.....35
- Gambar 2. Peta Wilayah Palestina sebelum dan sesudah pendudukan Israel.....36

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Pemikiran (diolah oleh penulis).....	23
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak dahulu, perlawanan terhadap diskriminasi, represi dan marginalisasi terdapat hampir di seluruh wilayah dan kebudayaan dunia. Aspirasi semua orang untuk dilindungi dari pengalaman ketidakadilan demikian telah dirumuskan dalam bentuk Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia tanpa membedakan suku, agama dan ras. Semua manusia layak dianugerahi hak tersebut di mana semua hak tersebut berasal dari martabat *inheren* manusia dan telah didefinisikan sebagai “klaim-klaim manusia untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain yang didukung oleh satu teori yang berpusat pada perikemanusiaan manusia, pada manusia sebagai manusia dan anggota umat manusia”. Semua klaim ini berhubungan dengan standar kehidupan, yang setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkannya dari masyarakat sebagai manusia.<sup>1</sup>

Sejarah manusia mencatat bahwa penindasan dan pelanggaran hukum atas hak-hak asasi manusia yang dilakukan akan menimbulkan perlawanan dari berbagai pihak. Pengorbanan jiwa raga dari mereka yang tertindas membuat harkat dan martabat manusia menjadi kehilangan arti dan makna. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menindas harkat martabat manusia

---

<sup>1</sup> Khadijah Binti Abdul Munir, Respon Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Israel Atas Palestina, (Undergraduated Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) p.13  
<https://www.undergraduatedthesisuin.khadijah.pdf>

merupakan pelanggaran berat dan perlu mendapat perhatian dan penanganan serius.<sup>2</sup> Pengalaman buruk umat manusia terkait penindasan HAM, terutama sejak perang dunia I dan II menimbulkan kesadaran untuk menempatkan pengormatan dan penghargaan HAM yang tertuang dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi pernyataan bangsa-bangsa di dunia tentang HAM, yakni *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diterima secara aklamasi pada tanggal 10 Desember 1948 oleh sidang Majelis Umum PBB.<sup>3</sup>

Sayangnya, meskipun mekanisme penghormatan terhadap HAM sudah dibentuk, kenyataannya kasus-kasus pelanggaran HAM masih sering terjadi. Tidak sedikit diantaranya merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang salah satunya menimpa masyarakat Palestina yang masih mengalami penjajahan oleh Israel. Palestina adalah negara di kawasan timur tengah yang hingga kini berusaha mendapatkan kedaulatannya sendiri dan diakui oleh dunia Internasional. Konflik politik yang mendera menjadikan Palestina hingga kini belum bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat. Diperparah dengan terjadinya konflik internal antara dua organisasi kuat di Palestina yaitu Hamas dan Fatah yang akhirnya menyebabkan terpecahnya Palestina menjadi dua wilayah kekuasaan, wilayah

---

<sup>2</sup> Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan dan Aspek Historis dan Yuridis, *Jurnal Undip3* no.2, (2021) pp.38-40 [www.jurnalundip.ac.id](http://www.jurnalundip.ac.id)

<sup>3</sup> Mashood Baderin, *Hukum Internasional HAM dan hukum Islam* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2007), p.41

Tepi Barat (West Bank) dikuasai oleh partai Fatah dan partai Hamas menguasai wilayah Jalur Gaza.<sup>4</sup>

Kesulitan lain yang menyebabkan sulitnya Palestina mendapatkan kemerdekaan karena pembelaan dan dukungan permanen secara membabi buta yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) selaku pemilik hak veto dalam PBB. Hak veto sendiri merupakan hak istimewa yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan (DK) di PBB. Hak istimewa ini digunakan untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Adapun negara yang memiliki hak tersebut yakni AS, Rusia, China, Inggris dan Perancis karena negara-negara inilah yang memprakarsai pembentukan PBB itu sendiri.<sup>5</sup> Pada saat ini, opini yang berkembang di media-media internasional menyebutkan keberadaan lima negara anggota tetap dan hak veto ditinjau kembali karena perkembangan dunia yang semakin kompleks serta sering dianggap membuat berlarut larutnya masalah internasional yang membawa akibat pada masalah kemanusiaan akibat digunakannya hak ini oleh negara-negara besar yang dianggap membawa kepentingannya sendiri dan juga kelompok.<sup>6</sup>

Salah satu contoh penyebab penggunaan hak veto yang menyebabkan berlarutnya konflik atau masalah internasional bisa dilihat dari penggunaan hak veto oleh AS terhadap konflik Palestina dan Israel. Hak veto oleh AS

---

<sup>4</sup> Muh Novan Prasetya, Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina, *Jurnal PIR2* no.2 (2018), p.180

<sup>5</sup> Rizal Setyo Nugroho, Sejarah Hak Veto Negara Pemilik Hak Veto dan Bisakah di hapus?, *Kompas.com*, 12 Maret 2022, <https://www.kompas.com/>

<sup>6</sup> Difa Lufiana Putri, Ap aitu Hak Veto dan Mengapa Hanya dimiliki oleh 5 Negara, *Kompas.com*, 28 Februari 2022, <https://www.kompas.com/>



digunakan untuk menjamin superioritas Israel di Kawasan Timur Tengah sehingga dalam realitasnya, penggunaan hak veto AS di DK-PBB tidak lebih dari hak AS untuk membela kebiadaban Israel dalam menindas bangsa Arab Palestina yang lemah dan tidak berdaya. Oleh *United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UN OCHA) kemudian mengeluarkan rilis total jumlah korban jiwa Palestina yang meninggal akibat konflik dalam rentang waktu 2008-2021. Tercatat, sebanyak 5.736 tewas dari pihak Palestina dan 251 orang dari pihak Israel.<sup>7</sup>

Selain jumlah tewas yang tidak berimbang, organisasi Hak Asasi Manusia Amnesty International mengungkapkan daftar pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan diantaranya tindakan diskriminasi, pelarangan ibadah di masjid Al Aqsa, pembantaian, penindasan, blokade wilayah Gaza, pengambilan harta secara paksa dan penahanan tanpa sebab. Israel juga konsisten dalam mengambil wilayah Palestina secara ilegal yang tentu saja berdampak pada kedaulatan negara tersebut. Perjuangan Palestina untuk merdeka terasa makin sulit ketika AS tetap konsisten dalam membantu Israel sehingga sikap arogansi Israel seringkali menghalau upaya rakyat Palestina untuk memperoleh HAM-nya.

Sikap arogansi ini tercermin ketika terjadi aksi pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh salah seorang turis asal Australia yang kemudian pelakunya ditangkap dan diadili oleh pengadilan Tel Aviv (ibukota Israel). Sayangnya, pelaku tersebut dibebaskan dengan alasan mengalami gangguan jiwa.

---

<sup>7</sup> Suhaib Salem, Korban Jiwa Konflik Yerusalem 2008-2021: Palestina 5.736 Israel 251, *Kumparan News*, 18 Mei 2021, <https://kumparan.com/>

Kejadian ini kemudian mendorong negara-negara Islam untuk menggelar konferensi Islam tingkat internasional, sehingga pada tanggal 22-25 September 1969 negara-negara Muslim pertama kalinya menggelar konferensi tingkat internasional untuk membahas isu Israel-Palestina. Hasil terpenting dalam pertemuan tersebut adalah didirikannya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan secara resmi diproklamasikan bulan Mei 1971.<sup>8</sup> Tujuan didirikannya OKI adalah untuk menciptakan rasa solidaritas antar negara anggota, menciptakan perdamaian dengan kerjasama dan menyelesaikan permasalahan atau konflik yang melibatkan negara anggota OKI dan umat Muslim agar terbentuk persatuan antar umat Muslim dan meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi, politik serta ilmu pengetahuan.<sup>9</sup>

Sampai saat ini, OKI merupakan organisasi besar kedua di dunia dengan keanggotaan sebesar 57 negara anggota di empat benua. Pembentukan OKI yang berdasarkan konsep *ummah* juga mencerminkan keinginan dari umat Islam diseluruh dunia untuk bersatu, terlepas dari politik, ekonomi, dan budaya. Sehingga dalam hal ini, isu Palestina adalah salah satu *domain* dari tujuan OKI itu sendiri. Namun yang perlu diketahui adalah pada awalnya, OKI berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh Palestina, tetapi OKI sekarang memperluas fokus pada peningkatan kesejahteraan seluruh umat Islam di seluruh dunia dengan cara mempromosikan dan membangun

---

<sup>8</sup> Adi Saputra, Sejarah Terbentuknya OKI, *CNN Indonesia*, 21 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210623160237-125-658417/sejarah-berdirinya-oki-organisasi-kerja-sama-islam>

<sup>9</sup> Mardenis, Revitalisasi Peran OKI Untuk Mewujudkan Negara Palestina Merdeka, *MMH4* no.2 (2021), pp.238-240

kerjasama antar organisasi-organisasi dunia dan kerjasama antar negara, khususnya negara Muslim.<sup>10</sup>

Kerjasama OKI mencakup berbagai aspek seperti, politik, masalah sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, serta perdagangan. Perubahan fokus dari OKI ini bermula ketika adanya *OIC 10th Years Program of Actions* yang ditetapkan berdasarkan *blueprints* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa kelima di Makkah pada Desember 2005. Tindakan tersebut dilakukan seiring banyak dan meningkatnya tantangan bagi negara-negara Islam. Program tersebut menjadi titik awal OKI dalam memfokuskan kebijakannya untuk melindungi HAM dan mengupayakan penghapusan segala bentuk manifestasi dan diskriminasi terhadap Muslim. Kehadiran OKI juga dianggap sebagai pencapaian besar bagi dunia Islam.<sup>11</sup>

Indonesia sendiri adalah negara yang menjadi anggota OKI Bersama dengan 56 negara lainnya, di mana Indonesia bersama dengan negara lainnya memprakarsai terbentuknya organisasi tersebut pada tahun 1969. Alasan mengapa Indonesia bergabung yakni Indonesia mempunyai prinsip bahwa segala bentuk penjajahan tidak sejalan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Salah satunya penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Alasan lainnya yakni Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang berpenduduk mayoritas Muslim mempunyai kesamaan pandangan terhadap agama dengan Palestina yaitu Islam, yang juga mempunyai kesamaan persepsi

---

<sup>10</sup> Nibras Nada, Organisasi Kerjasama Islam (OKI): Sejarah, Tujuan dan Anggota, *kompas.com*, 17 Februari 2020, <https://www.kompas.com>

<sup>11</sup> Muh. Novan Prasetya, Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina, *JurnalPir2* no.2 (2018) pp.190-191

untuk menjaga tempat yang dianggap suci dan penuh sejarah yaitu Masjidil Aqsa di Yerusalem.<sup>12</sup> Komitmen untuk terus memperjuangkan Palestina sudah dilakukan oleh para pemimpin Indonesia, mulai dari presiden Soekarno hingga presiden Joko Widodo. Bentuk dukungan presiden Soekarno bisa dilihat dari penolakan Indonesia untuk bertanding melawan Israel pada piala dunia tahun 1958 yang menyebabkan Indonesia tidak lolos ke putaran final. Sedangkan presiden Soeharto memberikan dukungan dengan mempertegas pentingnya kemerdekaan Palestina di depan raja Yordania, raja Hussein pada saat jamuan makanan.<sup>13</sup>

Masa pemerintahan presiden Habibie tidak banyak mengurus masalah konflik Israel dan Palestina mengingat pemerintahannya yang singkat, sedangkan presiden Megawati pada masa pemerintahannya turut mendukung kemerdekaan Palestina melalui pernyataan bahwa negara-negara Konferensi Asia Afrika (KAA) memiliki hutang kemerdekaan terhadap Palestina. Presiden Gusdur juga turut serta membantu kemerdekaan Palestina dengan mengajak kedua negara yang berkonflik untuk duduk dalam satu meja perundingan. Ia percaya opsi inilah yang terbaik untuk membantu kemerdekaan Palestina dengan *win-win solution*. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terus mengupayakan kemerdekaan Palestina yang dalam setiap kesempatan selalu mengutarakan dukungannya kepada Palestina. Presiden SBY juga memprakarsai program aksi 10 tahun OKI yang memuat

---

<sup>12</sup> Cantika Niscala Putri, Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Penguatan Diplomasi Islam, *Jurnal Sosial Politik* 8 no.1 (2022), pp.99-100

<sup>13</sup> Ramadhian Fadillah, Kisah Pak Harto Tegaskan Palestina Merdeka di Depan Raja Husein, *Merdeka.com*, 10 Juli 2016, <https://www.merdeka.com/>

implementasi dukungan kepada Palestina serta mengupayakan pengaktifan peran OKI untuk mendorong peranan AS, Uni Eropa PBB dan Rusia mengingat pihak-pihak inilah yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika pengambilan keputusan di PBB dan dunia internasional. Namun, upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil yang nyata karena Uni Eropa, Rusia dan AS tidak ingin mengambil pusing soal konflik yang terjadi di Palestina. Hal yang sama juga dilakukan oleh presiden Joko Widodo yang berupaya dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel, termasuk melalui OKI. Tindakan tersebut bukan tanpa sebab mengingat Indonesia dan Palestina sudah lama menjalin hubungan baik. Oleh karena itu, Indonesia selalu berupaya membantu Palestina, termasuk melalui organisasi internasional seperti OKI.

Dari penjabaran berbagai peran Indonesia di masa pemerintah Jokowi dalam membantu kemerdekaan Palestina melalui OKI menghasilkan ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran dan keikutsertaan Indonesia di OKI dalam membantu kemerdekaan Palestina. Penelitian ini akan menggunakan konsep diplomasi untuk menganalisis upaya dan peran Indonesia di masa kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui OKI.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melihat adanya permasalahan yang akan coba dijawab dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu **Bagaimana peran Indonesia di Organisasi**

## **Kerjasama Islam (OKI) dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini pada hakikatnya untuk mengetahui bagaimana peran dan keikutsertaan Indonesia di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di masa kepemimpinan Joko Widodo. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Indonesia di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi terkait upaya apa saja yang ditempuh Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam usaha pemenuhan HAM bagi rakyat Palestina serta alasan apa saja yang akhirnya mendorong Indonesia untuk bergabung dalam OKI demi membantu kemerdekaan Palestina. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai kajian kepentingan nasional dan diplomasi. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refleksi pemerintah Indonesia dan para peneliti dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dan negara anggota OKI untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Selain itu terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian untuk memahami hasil *output* dari adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis. Manfaat-manfaat tersebut yakni:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Dari sisi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan dalam menjelaskan bagaimana upaya yang ditempuh Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui OKI. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait bagaimana mengaplikasikan konsep dalam kajian Hubungan Internasional, terutama kajian mengenai diplomasi dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sarana dan prasarana dalam pencarian referensi maupun sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan khusus terhadap kajian kepentingan nasional dan diplomasi serta peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui OKI. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sebuah jawaban bagi kekosongan penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian dalam bidang Hubungan Internasional, khususnya bagi pengembangan kajian diplomasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam jangkauan pengetahuan peneliti, terdapat beberapa karya tulis yang secara substansial membahas berbagai upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang sudah diabadikan dalam bentuk artikel, jurnal, maupun buku. Dari sejumlah tulisan yang ada, peneliti belum menjumpai karya yang secara khusus dan detail mengkaji bagaimana peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui OKI. Sehingga dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur dan referensi yang cukup relevan untuk menunjang tema yang dikaji oleh penulis, literatur tersebut akan menjadi bahan acuan untuk mengkaji, menelusuri, dan mengungkapkan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Literatur yang penulis gunakan antara lain :

Literatur pertama ditulis oleh Cantika Niscala Putri yang dimuat dalam *Jurnal Sosial Politik* volume 8 nomor 1 dan diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul “Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Penguatan Diplomasi Islam”.<sup>14</sup> Tulisan ini mengkaji ranah diplomasi yang dilakukan OKI terhadap isu Israel dan Palestina. Diplomasi secara umum dipahami sebagai seni, praktik, dan kegiatan negosiasi untuk meraih kepentingan suatu negara. Diplomasi konvensional yang selama ini dipraktikkan dinilai memiliki

---

<sup>14</sup> Cantika Niscala Putri, Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Penguatan Diplomasi Islam, *Jurnal Sosial Politik* 8 no.1 (2022), pp.80-81



berbagai kekurangan. Diplomasi konvensional dipandang relatif tidak bersih, sehingga penting untuk membangun dan memperkuat diplomasi yang bersih berdasarkan perspektif Islam yang disebut sebagai diplomasi Islam. Diplomasi Islam yang dilakukan oleh OKI sangat berbeda dengan diplomasi konvensional yang memiliki banyak kekurangan dan relatif tidak bersih dalam pelaksanaannya. Artikel ini berupaya menganalisis peran Organisasi Kerjasama Islam dalam penguatan Diplomasi Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan Diplomasi Islam yang mengedepankan perdamaian dan kerjasama untuk penyelesaian suatu permasalahan, dipandang tepat untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan vital umat Islam serta sebagai upaya pencarian solusi untuk menyelesaikan konflik. Penulis juga menemukan bahwa dalam memperkuat diplomasi Islam, OKI melakukan dua peran penting, pertama, optimalisasi diplomasi dengan mengutamakan kerjasama dan perdamaian. Kedua, diplomasi yang berorientasi pada pencegahan dan penanganan konflik sehingga tujuan dari artikel ini yaitu menawarkan diplomasi Islam sebagai salah satu alternatif pengembangan diplomasi sebagai jalur lain dalam hubungan internasional.

Secara garis besar, artikel ini memberikan informasi terkait dengan sejarah terbentuknya OKI serta upaya negara-negara anggotanya dalam memperjuangkan apa yang menjadi tujuannya, salah satunya yakni isu terkait kemerdekaan Palestina. Sayangnya artikel ini tidak menguraikan lebih lanjut terkait isu Palestina dan fokus pada upaya penyelesaian masalah selain

Palestina seperti kerjasama ekonomi, Pendidikan dan teknologi antar negara OKI. Adapun perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian yang dibahas, di mana penelitian ini akan menyoroti peran Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina melalui OKI, sedangkan penelitian oleh Cantika fokus membahas penguatan diplomasi Islam oleh OKI yang fokus pembahasannya ke arah kerjasama ekonomi, teknologi, pendidikan. Dengan demikian, perbedaan penelitian juga terletak pada penggunaan konsep. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi (bukan diplomasi Islam) yang juga mengarah pada kepentingan nasional sedangkan penelitian Cantika menggunakan konsep Diplomasi Islam tanpa menjelaskan kepentingan dari diplomasi yang digunakan.

Literatur selanjutnya ditulis oleh Khadijah Binti Abdul Munir dengan judul “Respon Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Israel”.<sup>15</sup> Penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah volume 3 nomor 2 ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Syarif Hidayatullah UIN Jakarta bertujuan untuk mengetahui upaya OKI dalam merespon tindakan pelanggaran HAM oleh Israel di Palestina. Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak pelanggaran oleh Israel seperti pembunuhan yang disengaja, penyiksaan dan perlawanan secara tidak manusiawi, penangkapan tanpa sebab, menyita dan merampas properti milik rakyat Palestina dan lainnya. Adapun upaya OKI dalam merespon pelanggaran tersebut seperti mengadakan

---

<sup>15</sup> Khadijah Binti Abdul Munir, Respon Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Israel Atas Palestina, (Undergraduated Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) p.2, <https://www.undergraduatedthesisuin.khadijah.pdf>

persidangan puncak, mengutuk keras tindakan Israel di KTT OKI, memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, memboikot produk Israel, memberi bantuan finansial kepada Palestina dan lainnya. OKI mendukung upaya perdamaian kedua pihak dengan wacana *Two State Solution*, yaitu pembagian tanah Palestina menjadi dua bagian: Palestina dan Israel karena menurut OKI keduanya harus diakui sebagai sebuah entitas, baik Yahudi Israel maupun Palestina. Menurut OKI, realitas keberadaan Israel di tanah Palestina tidak bisa diubah sehingga solusi dua negara menjadi solusi yang tepat untuk saat ini.

Dalam hal ini, penulis juga menjelaskan bahwa OKI harus tegas dalam sikap dan tindakan untuk membela HAM Palestina mengingat Israel secara nyata telah melanggar hak tersebut. Atas dasar tersebut, OKI harus mendesak dan mendukung laporan Palestina kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk melakukan penyelidikan atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan oleh Israel, serta memperkuat kapasitas pemerintah dan rakyat Palestina di segala sektor kesehatan, pendidikan, pemerintahan, infrastruktur dan lainnya. OKI juga perlu menjadi mediator antara kelompok HAMAS dan Fatah yang hingga saat ini belum memiliki visi yang sama terkait masa depan Palestina. Ironisnya, kedua kelompok tersebut yang seharusnya menjadi harapan rakyat Palestina justru saling berkonflik sehingga hal tersebut dapat melemahkan perjuangan rakyat Palestina.

Tulisan oleh Khadijah memberikan informasi kepada peneliti terkait tindakan apa saja yang ditempuh OKI dalam membantu kemerdekaan

Palestina. Tulisan ini juga membantu penulis dalam membedah upaya OKI melalui prinsip HAM dalam memperjuangkan Palestina. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus kajian di mana tulisan ini tidak hanya membahas peran OKI tetapi khususnya membahas peran Indonesia melalui OKI dalam membantu memperjuangkan kemerdekaan Palestina, terutama terkait dengan pemenuhan HAM bagi rakyat Palestina. Sedangkan tulisan oleh Khadijah membahas secara umum berbagai upaya OKI dalam membantu pemenuhan HAM rakyat Palestina dan tidak menjelaskan secara komprehensif terkait peran Indonesia di dalamnya.

Literatur selanjutnya ditulis oleh Ega Nur Cahya yang dipublikasikan dalam *Jurnal Pendidikan PKN* volume 3 nomor 1 April 2022 dengan judul “Agresi Israel Terhadap Palestina yang Berujung Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Palestina”.<sup>16</sup> Jurnal ini membahas bagaimana sejarah terjadinya konflik Israel dan Palestina, bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Israel serta peran PBB dalam menyelesaikan konflik tersebut. PBB mengeluarkan kebijakan berupa resolusi yang dikeluarkan oleh majelis umum dan dewan keamanan serta dengan menyelenggarakan konferensi internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah Palestina dengan mempertemukan pihak yang bertikai agar dapat menyelesaikan konfliknya tersebut dengan jalan damai. Tetapi hal ini tidak menuai keberhasilan karena tidak dipatuhinya kebijakan PBB oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, serta kurangnya dukungan dari negara-negara Arab dan negara-negara Eropa.

---

<sup>16</sup> Ega Nur Cahya, Agresi Israel Terhadap Palestina yang Berujung Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Palestina, *Jurnal PKN* 3 no.1 (2022) p.43, <https://www.researchgate.net>

Tulisan oleh Ega memberikan informasi terkait bagaimana bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel serta bagaimana peran PBB dalam menyelesaikan konflik diantara keduanya. Adapun perbedaan penelitian Ega dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang dibahas, di mana penelitian ini lebih membahas bagaimana peran Indonesia melalui OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sedangkan penelitian Ega lebih membahas sejarah konflik serta bagaimana peran PBB di dalamnya.

Penelitian selanjutnya merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Mardenis dan dipublikasikan dalam jurnal MMH volume 41 nomor 2 pada tahun 2012 dengan judul “Revitalisasi peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mewujudkan negara Palestina Merdeka”.<sup>17</sup> Penelitian ini mengkritisi kelemahan mendasar OKI berupa rendahnya tingkat solidaritas antara negara anggotanya dalam menyikapi isu Israel-Palestina. Dikatakan bahwa sejak berdirinya OKI tahun 1969, organisasi kedua terbesar di dunia ini hanya mampu bersikap reaktif terhadap permasalahan yang dihadapi dunia Islam, sebaliknya kelemahan mendasar yang mendera umat Islam saat ini baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional adalah semakin jauhnya umat Islam dari pemahaman ajaran agama, termasuk tidak peduli dengan nasib yang dialami oleh rakyat Palestina. Penelitian ini juga menambahkan bahwa Indonesia yang dipandang dapat mensinergikan antara Islam dan Demokrasi seharusnya bisa memainkan peran penting dalam tata kelola dunia. Selama ini, peran Indonesia dalam konstelasi politik internasional tidak begitu menonjol.

---

<sup>17</sup> Mardenis, Revitalisasi Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) Untuk Mewujudkan Negara Palestina Merdeka, *MMH4* no.2 (2012), pp.244-245

Hal ini disebabkan karena kultur pemimpin politik Indonesia cenderung alergi terhadap konflik dan terlalu lebih mengutamakan harmoni meskipun secara jelas dapat menyebabkan kerugian untuk Indonesia itu sendiri.

Tulisan oleh Mardenis memberikan gambaran dan informasi terkait alasan mengapa saat ini OKI belum memberikan bantuan berarti untuk Palestina agar bisa terlepas dari penjajahan Israel serta bagaimana sikap Indonesia yang cenderung terkesan reaktif sehingga kemerdekaan utuh yang diharapkan Palestina masih jauh dari harapan. Secara umum tulisan ini juga menjelaskan betapa sulitnya bagi Palestina untuk bisa merdeka karena sekutu Israel seperti Amerika Serikat senantiasa menggunakan hak vetonya untuk menghalangi berbagai upaya yang ditempuh Palestina. Adapun perbedaan tulisan Mardenis dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang dibahas, di mana penelitian ini akan menguraikan peran Indonesia di OKI dalam membantu kemerdekaan Palestina di masa pemerintahan Joko Widodo sehingga kajiannya akan sangat berbeda dengan penelitian Mardenis yang fokus untuk mengkritisi OKI dalam mendorong upaya kemerdekaan Palestina.

Literatur terakhir ditulis oleh Misri A. Muchsin dalam Jurnal *Miqot* volume 19 nomor 2 Desember 2015 dengan judul “Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan”.<sup>18</sup> Jurnal ini menguraikan bagaimana sejarah keberadaan bani Israel di palestina melalui beberapa periode (Pasca nabi Sulaiaman, pasca kehancuran I), kelompok dan sekte di Yahudi yang berkaitan dengan perebutan wilayah di Palestina, estimasi Yahudi di Isarel

---

<sup>18</sup> Misri A. Muchsin, *Palestina dan Israel: Sejarah Konflik dan Masa Depan*, *Miqot* 19 no 2 (2015), p.390, <https://media.neliti.com/>

sebagai negara merdeka di Palestina. Tulisan ini mempertegas satu realitas yang nyata berwujud kini dan bahkan mendatang, Palestina semakin terpuruk dalam berhadapan dengan Yahudi Israel, sementara perhatian dan bantuan dari negara-negara Islam semakin sulit didapatkan karena sesama negara Islam sendiri dalam keadaan lemah dan suka berpecah belah antar negara dan dalam negara Islam sendiri, misalnya sebut saja Mesir, Suriah, Irak, Yaman dan seterusnya. Sementara Yahudi Israel semakin solid dan kuat dalam perekonomian, persenjataan dan mendapat dukungan pula secara terus menerus dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.

Tulisan oleh Misri memberikan informasi secara detail terkait sejarah Israel dan Palestina serta prospek ke depan yang di hadapi Palestina dalam melawan dominasi Israel dengan menegaskan kembali betapa tidak solidnya negara-negara Islam dalam membantu Palestina. Adapun perbedaan penelitian terletak pada focus kajian yang dibahas, di mana penelitian ini akan menguraikan peran Indonesia di OKI dalam membantu kemerdekaan Palestina di masa pemerintahan Joko Widodo sehingga kajiannya akan sangat berbeda dengan penelitian Misri yang lebih membahas sejarah konflik Israel Palestina serta propek masa depan Palestina dalam menghadapi dominasi Israel dan sekutunya.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Untuk memahami bagaimana peran Indonesia di OKI dalam mendorong kemerdekaan Palestina dari Israel, penulis menggunakan konsep

Kepentingan Nasional. Alasannya karena konsep kepentingan nasional dapat menjelaskan alasan Indonesia sebagai negara anggota OKI terus mengupayakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Penulis juga menggunakan konsep diplomasi untuk menjelaskan upaya-upaya diplomasi yang ditempuh Indonesia melalui OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di masa pemerintahan presiden Joko Widodo.

### **2.1.1 Diplomasi**

Diplomasi adalah salah satu bentuk implementasi dari kebijakan luar negeri, di mana kebijakan luar negeri suatu negara dirumuskan untuk mencapai kepentingan nasional. Diplomasi juga merupakan cara-cara yang diupayakan negara untuk mencapai tujuan nasional dan menggalang dukungan mengenai prinsip yang diambil sebuah negara. Hal ini merupakan perpanjangan dari kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap negara-negara lain menjadi sependapat dan mendukung kebijakan negara yang mengupayakan diplomasi. Berdasarkan definisi tersebut, menjelaskan bahwa negosiasi merupakan salah satu teknik diplomasi yang bertujuan agar disamping kepentingan nasional dapat tercapai kompromi atas pengaturan atau pengelolaan hubungan internasional melalui *lobbying*, dengan berbagai cara, yakni pertemuan ataupun surat menyurat diplomatik.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Simela Victor Muhammad, DPR RI dan Isu Palestina Diplomasi antar Parlemen, *Jurnal Kajian*9 no.1 (2014), pp.71-72



Peranan diplomasi penting dalam mempertahankan stabilitas tatanan internasional, karena diplomasi mengedepankan dialog dan bersifat menjembatani perbedaan menjadikan diplomasi sebagai salah satu aset nasional yang memegang peranan besar dalam mengatur kebijakan internasional, banyak permasalahan internasional yang diselesaikan melalui diplomasi baik dalam kerangka bilateral hingga multilateral. Menurut Sumaryo Suryokusumo, diplomasi merupakan satu bagian vital dalam kehidupan negara dan menjadi sarana utama dalam menangani masalah internasional demi mencapai perdamaian dunia. Dalam rangka mencapai tujuannya serta mendapat dukungan atas prinsip-prinsip yang dianutnya negara melakukan diplomasi. Diplomasi merupakan proses politik yang dilakukan demi menjaga kebijakan luar negeri suatu pemerintah dan mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lainnya.

Suryokusumo menjelaskan bahwa dalam diplomasi terdapat berbagai jenis. Salah satunya adalah diplomasi multilateral, atau diplomasi antar tiga atau lebih negara. Diplomasi multilateral disebut juga dengan diplomasi konferensi karena biasanya diplomasi model ini berlangsung selama konferensi antar negara-negara. G. R. Berridge juga memasukkan diplomasi multilateral sebagai salah satu model dalam diplomasi. Diplomasi konferensi pertama kali muncul pada awal abad ke-20, yaitu pada perang dunia pertama yang pada awalnya, tujuan kemunculan diplomasi konferensi ini adalah untuk pembentukan sebuah

konferensi untuk membicarakan masalah mendesak tentang strategi dan politik demi keberhasilan perang seperti membicarakan tentang pelaksanaan perang gabungan, pembelian material perang dan sebagainya. Sejalan dengan bertambahnya waktu, diplomasi konferensi berkembang menjadi Lembaga-lembaga yang lebih dari sekedar mekanisme koordinasi masa perang.<sup>20</sup>

Pasca Perang Dunia I, diplomasi konferensi berubah wujud menjadi LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang sekarang berubah menjadi PBB di mana berbagai perwakilan negara membicarakan kepentingan yang saling menguntungkan atau bahkan saling bertentangan serta berusaha memecahkan suatu perkara melalui perundingan, pertukaran pikiran dan ide. Hal ini sesuai dengan pendapat Sir Thomas Hovet Jr yang mengatakan: “yang mendasar bagi jenis diplomasi ini adalah keyakinan akan pentingnya pendapat umum dunia, dengan memfokuskan pendapat umum suatu keadaan, diperkirakan perhatian umum itu akan mampu mendinginkan situasi dan mencegah rentetan peristiwa yang bisa mengarah pada konflik”. Umumnya, penggunaan diplomasi konferensi banyak digunakan oleh organisasi regional yang melibatkan banyak negara mengingat jenis diplomasi ini termasuk ke dalam diplomasi multilateral. Organisasi internasional dalam hal ini selalu menggunakan diplomasi multilateral sebagai sarana dalam mengambil suatu kesepakatan atas suatu permasalahan. Seperti OKI,

---

<sup>20</sup> Muhammad Imam Nofiar, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Israel di Jalur Gaza tahun 2008, JurnalUIN, Vol.3 no.1 (2015), pp.80-82 <https://researchgate.com>

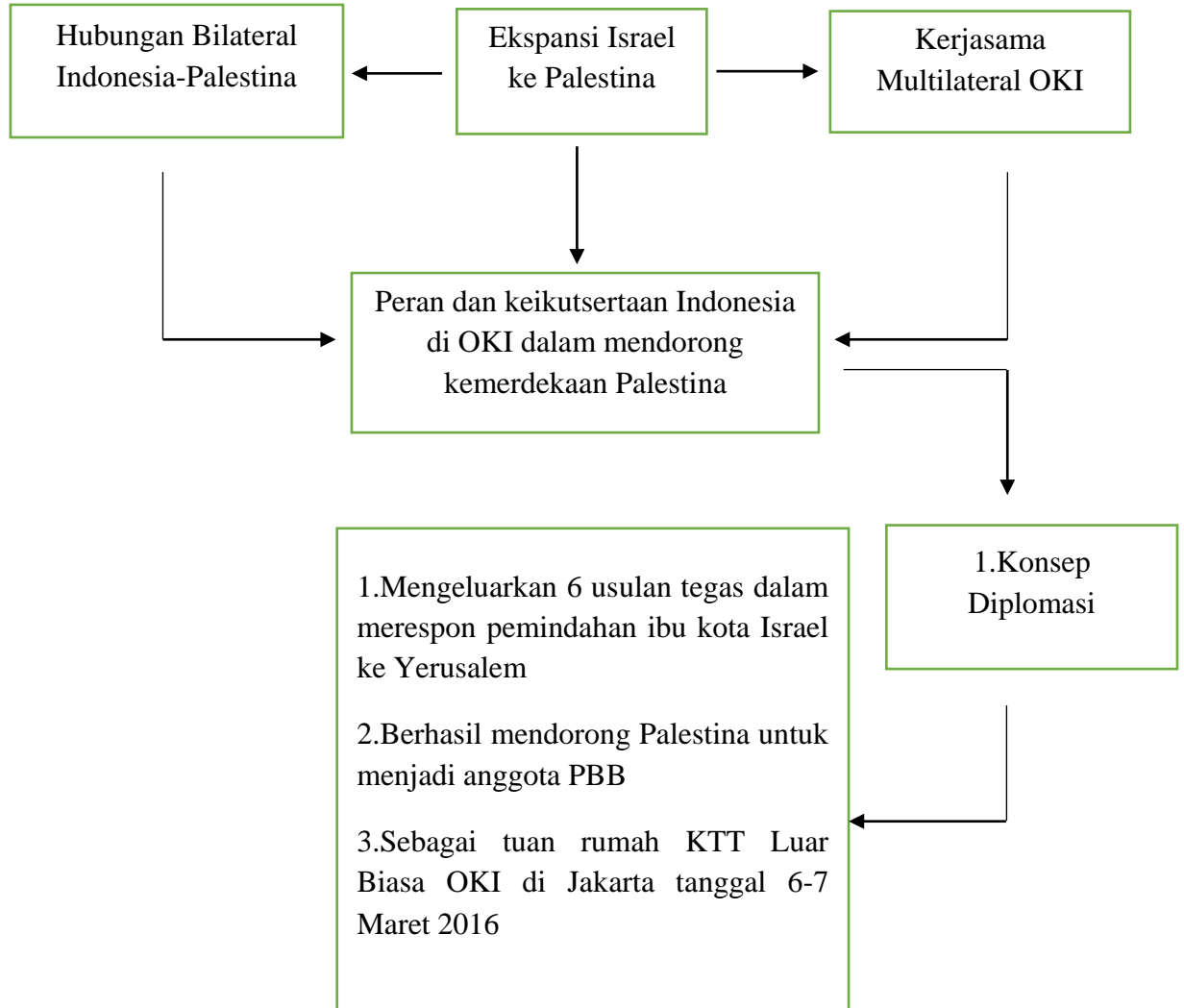
diplomasi multilateral menjadi bentuk diplomasi permanen di organisasi internasional ini.<sup>21</sup>

Konsep diplomasi digunakan oleh penulis untuk melihat berbagai upaya dan kebijakan Indonesia dalam membantu memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui OKI pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, Indonesia melalui OKI banyak mengupayakan diplomasi multilateral yang ditandai dengan pertemuan-pertemuan OKI untuk membahas kaitan terkait kemerdekaan Palestina. Upaya diplomasi tersebut bisa dilihat dari 6 usulan presiden Joko Widodo terhadap isu pemindahan ibukota Israel ke Yerusalem, di mana presiden Joko Widodo mengajak negara anggota OKI untuk satu suara dalam menyetujui 6 usulan tersebut pada saat KTT OKI di Turki tahun 2017. Indonesia juga bersedia menjadi wadah pelaksanaan diplomasi multilateral pada KTT OKI pada tahun 2016 terkait isu konflik Israel dan Palestina. Indonesia melalui OKI dengan diplomasi multilateralnya juga berhasil mendorong Palestina sebagai negara anggota PBB dan dapat menghimpun suara mayoritas negara-negara di PBB untuk mendukung Palestina.

---

<sup>21</sup> Simela Victor Muhammad, p.74

### 2.3 Alur Pemikiran



*Bagan 1. Alur Pemikiran (diolah oleh penulis)*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian memiliki jenis yang berbeda, dibedakan berdasarkan permasalahan dan tujuan. Penelitian yang bertujuan menjelaskan pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain disebut penelitian eksplanatif.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dan karakteristiknya disebut penelitian deskriptif analisis.<sup>23</sup> Penelitian deskriptif analisis biasanya dilakukan dengan mendapatkan informasi yang cukup tentang masalah penelitian mengenai apa atau bagaimana tentang suatu fenomena.<sup>24</sup>

Terkait dengan penelitian penulis, penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis fenomena dan karakteristik dari fenomena tersebut, tepatnya menjelaskan bagaimana peran Indonesia di OKI dalam membantu kemerdekaan Palestina pada masa pemerintah Joko Widodo.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk memahami metodologi penelitian kualitatif ini, penulis mengadopsi pengertian para ahli mengenai penelitian kualitatif. Menurut

---

<sup>22</sup> U. S. Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), p. 26.

<sup>23</sup> H. Nassaji, 'Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis,' *Language Teaching Research* 19 no.2, (2015), p. 129.

<sup>24</sup> Micheal John "Descriptive Research Designs: Types, Examples & Methods," *Formpl*, 1 Agustus 2021 <https://www.formpl.us>

Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, penelitian kualitatif mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap dunia. Ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari sesuatu dalam *setting* alamiah sesuatu tersebut, berusaha untuk memahami, atau menginterpretasikan fenomena dalam konteks makna yang dibawa orang ke dalam fenomena itu. Penelitian kualitatif mencakup penelitian dan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti studi kasus, pengalaman personal, introspektif, cerita kehidupan, wawancara, observasional, sejarah interaksional, dan teks-teks visual yang menggambarkan kejadian-kejadian rutin dan problematis yang bermakna dalam kehidupan individu.<sup>25</sup>

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga dalam melakukan pendalaman pemahaman dianjurkan untuk menggunakan data lengkap primer dan sekunder. Penulis dalam upaya menganalisis tulisan yang berfokus pada menjelaskan bagaimana peran Indonesia di OKI dalam membantu kemerdekaan Palestina pada masa pemerintah Joko Widodo, menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari informasi-informasi dan data non numerik yang dikumpulkan melalui berbagai sumber-sumber pustaka.

### **3.3 Variabel Penelitian, Tingkat Analisis dan Tipe Analisis**

Pada suatu penelitian, tentunya memiliki komponen-komponen penting yaitu variabel penelitian. Menurut Sugiyono, variabel penelitian

---

<sup>25</sup>U. S. Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), p. 15.

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Selain itu, Sugiyono juga membagi variabel penelitian menjadi dua yaitu variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*Independent*). Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel lain. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah *peran Indonesia* Sedangkan variabel terikatnya adalah *kemerdekaan Palestina*.

Dalam membahas tingkat analisis, setidaknya bisa dibedakan menjadi beberapa tingkatan seperti individu, kelompok, negara dan sistem internasional. Pada penelitian ini, tingkat analisis yang digunakan yakni negara dan organisasi internasional sesuai dengan variabel dependen yang merupakan variabel OKI sebagai objek yang dipengaruhi oleh variabel independen yakni peran dan keikutsertaan Indonesia melalui OKI dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.

Dalam proses menentukan tipe analisis, harus menetapkan unit ekplanasi dan unit analisa terlebih dahulu. Unit ekplanasi bisa disebut sebagai variabel independen, sedangkan unit analisisnya sebagai variabel dependen. Sedangkan tipe analisis bisa di bagi menjadi tiga bagian yakni reduksionis, korelasionis, dan induksionis. Tipe analisis reduksionis

---

<sup>26</sup> M. Moas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), p. 26.

---

merupakan tipe analisis yang unit ekplanasinya berada pada tingkat yang lebih rendah dari unit analisisnya. Tipe analisis korelasionis merupakan tipe analisis yang unit eksplanasi dan unit analisisnya berada pada tingkat yang sama. Sedangkan tipe analisis indusionis merupakan tipe analisis yang unit eksplanasinya lebih tinggi tingkatannya dari unit analisisnya.

Dalam penelitian ini unit eksplanasi berada pada tingkat sistem internasional berupa organisasi internasional yakni OKI, kemudian unit analisisnya berada pada tingkatan yang lebih kecil (negara) yakni Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe analisis Reduksionis dikarenakan unit eksplanasi dan analisisnya pada tingkatan yang lebih kecil dibandingkan unit eksplanasinya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah teknik pengumpulan data karena tujuan dari penelitian yaitu memperoleh data yang diharapkan dapat memenuhi standar data. Sehingga pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode studi pustaka yang dalam metode ini penulis menggunakan catatan, transkrip buku dan lainnya yang dapat mendukung penelitian penulis. Dengan metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan memahami bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan fokus penelitian baik berupa laporan, buku, maupun bahan lainnya yang dapat menunjang proses penelitian. Dalam hal ini, sumber data diperoleh melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan



Daerah Nusa Tenggara Barat, Perpustakaan Universitas Mataram, situs daring resmi Kementerian Luar Negeri dan lainnya.<sup>27</sup>

### **3.5 Jenis Data**

Dalam proses pengumpulan data, bisa dibedakan menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data yang penulis gunakan adalah data sekunder dan primer. Data keduanya diperoleh dari studi kepustakaan antara lain berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, berita serta data dari lembaga pemerintah yang sumbernya kredibel untuk dimasukkan kedalam penelitian ini.

### **3.6 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian berfungsi untuk memfokuskan penelitian pada hal-hal yang menyangkut dengan topik penelitian agar fokus pembahasannya tidak melebar dari pembahasan

#### **3.6.1 Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi pada penelitian ini memfokuskan pembahasannya terkait dengan bagaimana peran Indonesia di OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo. Sehingga materi dalam penelitian ini seputar latar belakang bagaimana proses penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, sejarah kerjasama bilateral Indonesia dan Palestina, awal mula terbentuknya OKI dan upaya apa saja yang dilakukan Indonesia melalui OKI untuk membantu kemerdekaan

---

<sup>27</sup> Ariesto Hadi Sutopo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, (Jakarta: Kencana, 2010), p.15

Palestina.

### **3.6.2 Ruang Lingkup Waktu**

Dalam hal ruang lingkup waktu di penelitian ini, penulis fokus untuk mengangkat permasalahan yang masih terus berlangsung meskipun berbagai upaya dan peran Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina sudah dilaksanakan sejak lama mengingat negara tersebut sampai dengan saat ini masih belum merdeka dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Oleh karena itu, penulis akan fokus pada peran dan peran Indonesia pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam membantu kemerdekaan Palestina.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis bisa diartikan sebagai sebuah proses untuk mengolah dan mendeskripsikan data yang telah ditemukan selama penelitian. Data-data ini diolah dan dikaji hingga mendapatkan sebuah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam proses analisis data terdapat empat tahap yang harus dilakukan, yaitu pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **3.7.1 Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data yang diperoleh dari kajian kepustakaan baik dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta berita-berita yang sumbernya kredibel dan memiliki reputasi yang baik.

### **3.7.2 Reduksi Data**

Dalam proses reduksi data, data-data yang telah ditemukan akan dipilah sehingga data yang memang relevan dan diperlukan akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan seperti sumber yang tidak kredibel ataupun pembahasannya yang tidak lengkap tidak digunakan. Data-data yang telah dipilah ini tentunya merupakan data yang sesuai dengan penelitian yang diteliti sehingga membantu penulis dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan yaitu sejarah penjajahan yang dilakukan Israel, dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Palestina, peran Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo melalui OKI dalam upaya mendorong kemerdekaan Palestina.

### **3.7.3 Penyajian Data**

Dalam proses penyajian data, data-data yang telah dipilah akan dikumpulkan. Barulah kemudian data tersebut akan disajikan, baik dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan sebagainya. Proses ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan hasil akhir dari sebuah penelitian.

### **3.7.4 Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan sebuah proses akhir dari seluruh rangkaian penelitian. Data-data yang telah disajikan kemudian akan ditarik dalam sebuah kesimpulan. Kesimpulan inilah yang kemudian akan menjawab pertanyaan mengenai permasalahan dalam penelitian.

### 3.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi 5 Bab, adapun sistematika penulisannya adalah seagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas tentang: latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sesuai dengan judul, "*Peran Indonesia di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina Pada Masa Kepemimpinan presiden Joko Widodo*". Pada latar belakang penulis mendeskripsikan mengenai sejarah konflik Palestina dan Israel serta terbentuknya OKI, penulis juga menjelaskan secara ringkas latar belakang kerjasama bilateral Indonesia dengan Palestina serta peran Indonesia di OKI dalam membantu kemerdekaan Palestina.

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang: penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan alur pemikiran. Penelitian terdahulu penulis gunakan untuk menjabarkan pembeda antara penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang diangkat penulis dengan penelitian ini sendiri, dan titik pembeda dari penelitian penulis adalah penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana peran dan keikutsertaan Indonesia di OKI dalam membantu kemerdekaan Palestina pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo. Kerangka pemikiran yang penulis gunakan untuk membahas topik tersebut adalah konsep HAM dan Kerjasama Multilateral.

Bab III Metodologi penelitian, membahas tentang: jenis dan pendekatan penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, sumber

data dan teknik analisis data serta sistematika penulisan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini bertujuan menganalisis secara kualitatif menjelaskan bagaimana peran Indonesia di OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo.

Bab IV Pembahasan, pada bagian ini memuat bagian inti dari penelitian, karena didalamnya memaparkan jawaban dari rumusan masalah dalam suatu penelitian, tentunya sesuai dengan pisau analisis yang digunakan dan telah dipaparkan pada Bab II. Bagian ini akan menjelaskan menjelaskan bagaimana peran Indonesia di OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan. Setelah memaparkan pembahasan penelitian pada Bab IV, maka pada bagian ini memaparkan satu benang merah simpulan yang menjadi jawaban penelitian secara lugas.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan terkait bagaimana peran Indonesia di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo. Di mulai dari menjelaskan sejarah konflik Israel dan Palestina, sejarah terbentuknya OKI hingga bagaimana peran dan upaya para pemimpin Indonesia, termasuk presiden Joko Widodo dalam membantu memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui OKI.

#### 4.1 Sejarah Konflik Israel dan Palestina

Palestina merupakan sebuah negara yang terletak di pantai Timur Laut Mediterania, berada di sebelah Barat Asia dan menjadi daratan penghubung antara benua Asia dan Afrika. Sedangkan Yahudi Bani Israel sebagai penduduk Israel menyebar sampai ke Yunani, Iran, Romawi, Arab, Mesir dan negara-negara Eropa lebih dari 250 tahun.<sup>28</sup> Adapun awal mula konflik diantara keduanya berawal dari kongres Zionis pertama di Basel pada Agustus 1897. Pada kongres itu, organisasi Zionis mengagendakan hal utama berupa pendirian negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Rencana strategis Zionis ini diprakarsai oleh pelobi top Zionis (*Chief Zionist Negotiator*), Dr. C. Wheizmann dan mendapatkan dukungan dari Zionis Inggris. Di bawah

---

<sup>28</sup> Misri A. Muchsin, Palestina dan Israel: Sejarah Konflik dan Masa Depan, *Jurnal Ilmu Keislaman* 39 no.2 (2015) pp.73-75  
[jurnalmiqotj.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/32](http://jurnalmiqotj.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/32)

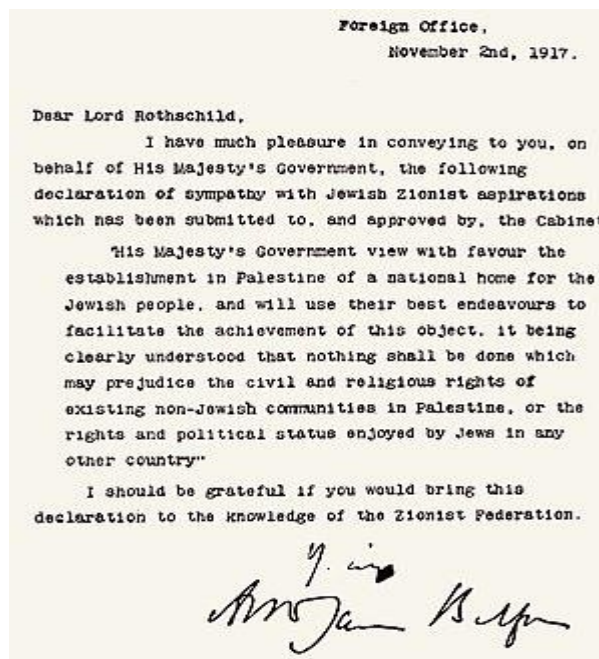
komandonya, para kaum Yahudi berhasrat untuk mencapai agenda utamanya yaitu mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina.<sup>29</sup>

Sejak diadakannya kongres Zionis pertama tersebut, memang banyak imigran Yahudi yang berdatangan ke Palestina sebagai bentuk perjuangan kaum Yahudi untuk mewujudkan mimpi mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Berbagai gelombang imigran berdatangan ke Palestina. Gelombang imigrasi berdatangan dari berbagai negara seperti Rusia, Rumania, Polandia, Bulgaria, Yugoslavia, Yaman, Jerman dan negara-negara Afrika. Deklarasi Balfour adalah surat yang dikirim tanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Britania Raya/ Inggris, Arthur James Balfour kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikirimkan kepada Federasi Zionis. Surat itu menyatakan posisi yang disetujui pada rapat kabinet Inggris pada Oktober 1917, bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana Zionis untuk membuat “tanah air” bagi Yahudi di Palestina, dengan syarat bahwa tak ada hal-hal yang boleh dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak dari komunitas yang ada disana.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Nathan Witkin, A Two state/One Land Solution For The Israeli-Palestinian Conflict, *Middle East Journal* 65 no.1 (2020), p.89 <https://www.middleeastjournal.com>

<sup>30</sup> Muhammad Hafiz, Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim, *Al-Ahkam: Journal Pemikiran Hukum Islam* 23 no.2, (2013), pp.48-49



Gambar 1. Isi surat Deklarasi Balfour. <https://www.kompas.com/>

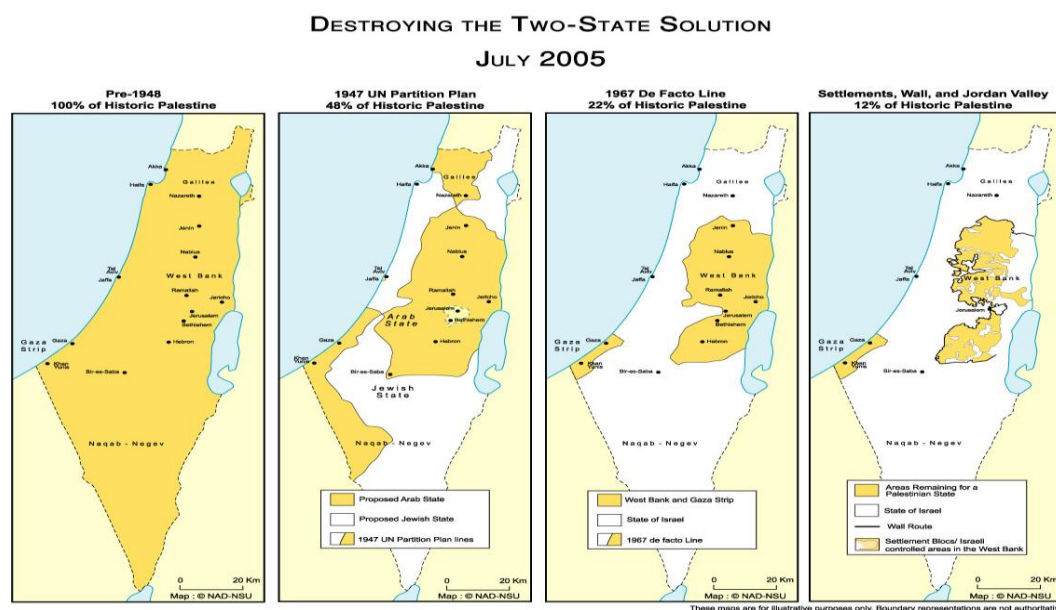
Pada saat itu sebagian besar wilayah Palestina masih berada di bawah kekuasaan Ottoman Turki. Namun, dengan dikeluarkannya Deklarasi Balfour yang menjanjikan kampung halaman bagi para Yahudi, mereka menjadi yakin dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan langkah awal untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara Israel di tanah Palestina. Terbukti pada tanggal 15 Mei 1948 negara Israel Raya berhasil mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara utuh. Tidak terima dengan deklarasi sepihak dari Israel, negara-negara Timur Tengah seperti Lebanon, Syria, Mesir, Irak dan Yordania menyerang Israel, tetapi perang tersebut dimenangkan oleh Israel.<sup>31</sup>

Hal ini disebabkan karena dukungan persenjataan dari Amerika Serikat yang memang sejak awal bersekutu dengan Israel. Bahkan, Israel juga menginvasi negara-negara tersebut yang kemudian dihentikan oleh PBB

<sup>31</sup> Ajeng Wirahmi, Sejarah Perang 6 Hari yang Dimenangkan Israel, *sindonews*, 12 September 2022, <https://international.sindonews.com/read/883053/43/sejarah-perang-6-hari-yang-dimenangkan-israel-1662973791>



melalui resolusi nomor 242 yang berisikan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah yang berhasil didudukinya. Tetapi pada kenyataannya, wilayah yang diduduki Israel seperti Semenanjung Sinai, jalur Gaza serta dataran tinggi Golan tetap menjadi jajahan Israel hingga dicapainya kesepakatan Camp David tahun 1979.<sup>32</sup>



Gambar 2. Peta Wilayah Palestina sebelum dan sesudah pendudukan Israel.  
<https://www.cnbcindonesia.com/>

Pada tahun 1979 akhirnya kesepakatan berhasil diraih oleh kedua pihak yang berperang yakni Israel dan Mesir. Namun, kesepakatan Camp David tersebut pada kenyataannya tidak sedamai yang dibayangkan. Sampai pada saat ini, Israel masih menjajah para penduduk Palestina dan banyak melakukan pelanggaran HAM. Banyaknya operasi militer yang dilakukan

<sup>32</sup> Tito Helmawan Reditya, 17 september Dalam Sejarah: Kesepakatan Camp David Ditekan Pada 1978, *Kompas.com*, 17 september 2021, <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/17/150733770/17-september-dalam-sejarah-kesepakatan-camp-david-ditekan-pada-1978>

oleh Israel menyebabkan pemberontakan dilakukan oleh rakyat Palestina. Sampai saat ini walaupun banyak percobaan untuk melakukan perdamaian seperti “kesepakatan perdamaian Oslo” dan percobaan perdamaian lainnya yang diusahakan oleh PBB dan negara-negara lain akan tetapi hanya bertahan beberapa saat saja dan konflik yang serupa bermunculan kembali. Operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Israel ini mengalami banyak pelanggaran HAM khususnya yang menimpa Wanita dan anak-anak.<sup>33</sup> Sampai saat ini, konflik Israel dengan Palestina belum menemukan titik damai.

#### 4.2 Sejarah Terbentuknya OKI

OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang sebelumnya dikenal sebagai Organisasi Konferensi Islam adalah organisasi internasional di kalangan negara-negara Islam. OKI didirikan oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan Muslim pada tahun 1969 dengan tujuan utama untuk memajukan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota. OKI merupakan organisasi kedua terbesar setelah PBB dengan keanggotaan sejumlah 57 negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam. Semua negara yang tergabung dalam OKI menjadi anggota PBB, kecuali Palestina yang belum sepenuhnya menjadi anggota PBB dan hanya menjadi status pengamat. OKI sendiri menyumbang hampir sepertiga anggota PBB.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Jafar Sodiq, Riwayat Aneksasi: Kronologi Israel Caplok Wilayah Palestina, *Solopos.com*, 13 Agustus 2020, <https://www.solopos.com/>

<sup>34</sup> Adi Saputra, Sejarah Terbentuknya OKI, *CNN Indonesia*, 21 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210623160237-125-658417/sejarah-berdirinya-oki-organisasi-kerja-sama-islam>

Jika bicara historis, OKI lahir pada tanggal 25 September 1969 di mana para pemimpin dunia Islam sidang untuk pertama kalinya di Rabat, Maroko untuk membahas isu pembakaran masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969 yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Aksi pembakaran Masjid Al-Aqsa dilakukan oleh salah seorang turis asal Australia yang kemudian pelakunya ditangkap dan diadili oleh pengadilan Tel Aviv (ibukota Israel). Sayangnya, pelaku tersebut dibebaskan dengan alasan mengalami gangguan jiwa. Hal ini menimbulkan keprihatinan dunia internasional dan mendorong para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi Islam pertama kalinya untuk menegaskan pembentukan organisasi kerjasama Islam, penghormatan terhadap piagam PBB dan hak asasi manusia.<sup>35</sup>

Rapat persiapan di Rabat pada tanggal 8 dan 9 September dihadiri 7 negara panitia persiapan yang terdiri dari Arab Saudi, Maroko, Iran, Malaysia, Nigeria, Somalia dan Pakistan yang diprakarsai oleh raja Faisal dari Arab Saudi, raja Hasan II dari Maroko, dan perdana Menteri Malaysia Tun Tunku Abdul Rahman Putra Al-haj untuk mengusulkan agar mengadakan sidang negara Muslim di dunia di Rabat. Undangan tersebut kemudian dikirim ke 25 negara. Pada tahun 1970, pertemuan pertama konferensi Islam oleh para Menteri luar negeri diadakan di Jeddah Arab Saudi yang memutuskan untuk mendirikan sekretariat permanen yang dipimpin oleh sekretaris jenderal organisasi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Adara, 52 Tahun Peristiwa Pembakaran Mimbar Masjid Al-Aqsa, *Adarelief.com*, 7 Oktober 2021, <https://adararelief.com/52-tahun-peristiwa-pembakaran-mimbar-masjid-al-aqsa/>

<sup>36</sup> Kemlu RI, Organisasi Kerjasama Islam, *Kemlu.go.id*, 9 Desember 2022, <https://kemlu.go.id/>

Tujuan didirikannya OKI adalah untuk menciptakan rasa solidaritas antar negara anggota, menciptakan perdamaian dengan kerjasama dan menyelesaikan permasalahan atau konflik yang melibatkan negara anggota OKI dan umat Muslim agar terbentuk persatuan antar umat muslim dan meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi, politik serta ilmu pengetahuan.<sup>37</sup> Pembentukan OKI yang berdasarkan konsep *ummah* juga mencerminkan keinginan dari umat Islam diseluruh dunia untuk bersatu, terlepas dari politik, ekonomi, dan budaya, sehingga dalam hal ini, isu Palestina adalah salah satu *domain* dari tujuan OKI itu sendiri. Namun yang perlu diketahui adalah pada awalnya, OKI berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh Palestina, tetapi OKI sekarang memperluas fokus pada peningkatan kesejahteraan seluruh umat Islam di seluruh dunia dengan cara mempromosikan dan membangun kerjasama antar organisasi-organisasi dunia dan kerjasama antar negara, khususnya negara Muslim.<sup>38</sup>

Kerjasama OKI mencakup berbagai aspek seperti, politik, masalah sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, serta perdagangan. Perubahan fokus dari OKI ini bermula ketika adanya *OIC 10th Years Program of Actions* yang ditetapkan berdasarkan *blueprints* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa kelima di Makkah pada Desember 2005. Tindakan tersebut dilakukan seiring banyak dan meningkatnya tantangan bagi negara-negara Islam. Program tersebut menjadi titik awal OKI dalam memfokuskan

---

<sup>37</sup> Mardenis, Revitalisasi Peran OKI Untuk Mewujudkan Negara Palestina Merdeka, *MMH4* no.2 (2021), pp.238-240

<sup>38</sup> Nibras Nada, Organisasi Kerjasama Islam (OKI): Sejarah, Tujuan dan Anggota, *kompas.com*, 17 Februari 2020, <https://www.kompas.com>

kebijakannya untuk melindungi HAM dan mengupayakan penghapusan segala bentuk manifestasi dan diskriminasi terhadap Muslim. Kehadiran OKI juga dianggap sebagai pencapaian besar bagi dunia Islam.<sup>39</sup>

Sebagai representasi negara-negara Islam di dunia global, OKI punya peran strategi dalam penguatan diplomasi Islam. OKI secara rutin mengadakan pertemuan atau konferensi tingkat tinggi internal OKI dalam merespon suatu permasalahan atau konflik yang melibatkan negara-negara anggota OKI. Dalam OKI terdapat dua pertemuan besar, yaitu KTT dan Pertemuan Menteri Luar Negeri. Selain itu, OKI juga menjalin kerjasama dengan PBB sebagai organisasi terbesar pertama di dunia dan juga menjalin kerjasama dengan organisasi internasional lainnya dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan vital umat Islam serta sebagai upaya pencarian solusi untuk menyelesaikan konflik. Pertemuan dan kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan diplomasi Islam dengan tujuan melindungi norma, nilai, dan tentunya umat Islam. Adapun fokus prioritas utama dari OKI seperti, koordinasi dan kolaborasi antar negara anggota, penanganan Islamophobia, dan mempromosikan dan mengutamakan kepentingan vital umat Islam di dunia dalam forum internasional. OKI mempunyai kehormatan tunggal dalam membentuk kesatuan umat Islam dan secara aktif mewakili umat Islam. Dalam aktivitas internasional ataupun penanganan konflik dengan menanamkan nilai-nilai moralitas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, OKI juga dapat memainkan peran pelengkap

---

<sup>39</sup> Muh. Novan Prasetya, Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina, *JurnalPir2* no.2 (2018) pp.190-191

sebagai mitra dari organisasi internasional seperti PBB dan lainnya. Peran tersebut dimainkan oleh OKI terutama sebagai mediator antar negara atau pihak-pihak yang berkonflik.<sup>40</sup>

Dalam hal ini, OKI telah menunjukkan perannya yang berorientasi pada kerjasama dan perdamaian dengan mendorong dan meningkatkan kerjasama eksternal dengan PBB, Uni Eropa, dan media internasional dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Islamophobia di Perancis akibat adanya serangan pada tanggal 13 November 2015 yang terjadi di Paris. OKI juga memfokuskan upaya-upaya anti terorisme, *interfaith dialogue* dan kerjasama yang dibangun OKI dengan PBB, Uni Eropa, dan media internasional. Pada intinya, penelitian ini mengedepankan peran OKI dalam mendorong adanya pluralisme budaya dan mendorong rasa saling menghormati satu sama lain melalui pendekatan *Interfaith Dialogue* serta menekankan dan meningkatkan kerjasama eksternal OKI demi untuk menguatkan posisi Islam di dunia, termasuk di dalamnya mendukung Palestina dalam mendapatkan kebebasan hak negara berdaulat.<sup>41</sup>

#### **4.3 Peran Indonesia di OKI dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina**

Indonesia adalah negara yang menjadi anggota OKI bersama dengan 56 negara lainnya, di mana Indonesia bersama dengan negara lainnya memprakarsai terbentuknya organisasi tersebut pada tahun 1969. Dalam hal ini, berbagai pemimpin Indonesia memiliki pandangan yang sama terkait isu

---

<sup>40</sup> Nibras Nada, OKI: Sejarah Tujuan dan Anggota, *Kompas.com*, 17 Februari 2020, <https://www.kompas.com/>

<sup>41</sup> Cantika Niscala Putri, p.99

Palestina, di mana segala kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negara tersebut harus segera dihentikan. Meskipun begitu, upaya dan tindakan dalam menyikapi isu Palestina oleh para pemimpin Indonesia dilakukan secara berbeda-beda. Berikut ini adalah uraian terkait peran dari setiap pemimpin Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina.

#### **4.3.1 Peran Pemimpin Indonesia Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina Sebelum Pemerintahan Presiden Joko Widodo**

Hubungan Indonesia dan Palestina telah terjalin sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, Indonesia memiliki kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan dengan adanya pengakuan dari negara lain untuk mencapai keabsahan suatu kedaulatan. Indonesia mendapatkan pengakuan pertama kali dari salah satu negara Timur Tengah yaitu Palestina dan Mesir. Dari kejadian tersebut, Indonesia secara langsung terlibat dalam mendukung Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Sikap Indonesia yang mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina, membuktikan adanya kedekatan yang dirasakan karena adanya perasaan senasib ingin mendapatkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga terjalinlah kedekatan emosional antara Indonesia dan Palestina baik dalam konteks global maupun agama. Kebijakan Indonesia di tingkat global, salah satunya adalah mendukung perjuangan bangsa yang masih dalam penjajahan. Seperti dukungan penuh terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk

mendapatkan kemerdekaan yang di mana sebagian wilayahnya dikuasai kaum Zionis Israel.<sup>42</sup>

Berdasarkan pembukaan (*preamble*) UUD 1945 pada alinea pertama yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak semua bangsa maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Oleh karena itu, sejak Presiden Soekarno, Indonesia akan selalu mendukung dan membantu perjuangan Palestina hingga mendapatkan kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat. Semua bangsa termasuk bangsa Palestina, membela, mendukung, dan menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina pada era modern ini sama dengan membela prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Pada masa kepemimpinan Dr. Ir. H. Soekarno, dukungan terhadap Palestina sangat kuat. Presiden Soekarno menegaskan dalam pidatonya bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Dukungan presiden Soekarno terhadap Palestina ditunjukkan saat mulai menggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1953. Dalam forum tersebut, Indonesia dan Pakistan menolak keras diikutsertakannya Israel dalam konferensi tersebut. Seiring berjalannya waktu, presiden Soekarno menilai Israel yang didirikan atas bantuan Inggris merupakan bentuk nyata kolonialisme baru yang mengancam perdamaian dunia. Menyikapi

---

<sup>42</sup> Prasetya, Diplomasi Politik Indonesia Terhadap kemerdekaan Palestina, *Jurnal PIR2* no.2 (2018), pp.180-182



hal tersebut, saat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955, Presiden Soekarno mengundang Palestina meskipun saat itu belum diakui sebagai negara merdeka. Mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dalam hal ini mewakili kepentingan Palestina untuk mengikuti kegiatan KAA 1955. Dalam pidato pembukaan KAA, ia secara lantang memberikan dukungan kepada negara-negara yang masih mengalami penjajahan. Semangat yang disuarakan presiden Soekarno terkait anti imperialisme dan kolonialisme bergaung hingga negeri Palestina. Bahkan, pidato pembukaan Soekarno di KAA juga menginspirasi tokoh perjuangan kemerdekaan Yasser Arafat.<sup>43</sup>

Sikap anti imperialisme presiden Soekarno sangat keras, bahkan hingga menyentuh ranah olahraga. Ia menolak kehadiran atlet-atlet Israel dan Taiwan-negara baru yang didukung Barat dalam ajang Asian Games 1962 yang diadakan di Jakarta. Karena sikapnya, perwakilan *International Olympic Committee* (IOC) sekaligus pendiri Asian Games asal India, Guru Dutt Sondhi datang ke Jakarta dan menyatakan legitimasi Asian Games 1962 tidak bakal diakui IOC. Ia menyatakan Indonesia keluar dari keanggotaan IOC, sambil menuduh IOC sebagai corong imperialis, presiden Soekarno merancang Olimpiade tandingan bernama Ganefo (*Games of the New Emerging Forces*) pada November

---

<sup>43</sup> Wangke H, Dukungan Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina, *Jurnal Info Singkat*10 no.1 (2018), pp.9-11

1963.<sup>44</sup> Dengan demikian, peran Indonesia dibawah pemerintahan Soekarno dalam mendukung kemerdekaan Palestina lebih dominan bersifat politis, dan ini terlihat pada setiap tindakannya yang selalu mengkritik dan mengucilkan Israel dan pergaulan internasional. Sikap presiden Soekarno sangat tegas terhadap Israel dan lebih dominan dalam memberikan dukungan penuh pada Palestina.

Namun, dibalik semua bentuk dukungan presiden Soekarno terhadap Palestina, terdapat maksud tersembunyi. Sikap politik presiden Soekarno yang anti imperialisme dan kolonialisme serta lebih condong ke blok Timur membuat banyak negara blok Barat menjadikan presiden Soekarno sebagai target operasi. Sebagai sesama negara Muslim, presiden Soekarno berusaha mendekati Palestina dengan cara menjalin hubungan kedua negara mengingat Palestina juga musuh bagi blok Barat. Dengan terciptanya hubungan antar kedua negara, ia berharap dapat menjadikan Palestina sebagai rekan dan kekuatan baru dalam melawan blok Barat yang sedang mengincar dirinya. Meskipun begitu, alasan tersebut tetap mengindikasikan bahwa presiden Soekarno mendukung kemerdekaan Palestina dari imperialisme oleh Israel dan para sekutunya.<sup>45</sup>

Jika diperhatikan, presiden Soekarno dalam penggunaan diplomasinya terhadap Palestina banyak menggunakan jenis diplomasi konferensi, hal ini bisa dilihat dari dukungan presiden Soekarno

---

<sup>44</sup> Dandi Bayu Bramasta, Menengok Jejak dukungan Bung Karno akan kemerdekaan Palestina, *Kompas.com*, 19 Mei 2021, <https://www.kompas.com/>

<sup>45</sup> Cantika Niscala Putri, p.104

terhadap Palestina saat mulai menggagas KAA pada 1953 di mana ia mengundang Palestina meskipun saat itu belum diakui sebagai negara merdeka. Dalam konferensi tersebut, Soekarno menentang Israel dengan tegas sebagai bentuk imperialisme baru yang dalam pidatonya berhasil mempengaruhi negara-negara Arab untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Selain KAA, melalui pembentukan Ganefo, presiden Soekarno juga menentang keikutsertaan Israel dan Taiwan dalam olahraga dunia karena kedua negara tersebut bagi presiden Soekarno adalah bentuk imperialisme baru yang dapat membahayakan stabilitas keamanan dunia.

Di masa Orde Baru, sikap H. Muhammad Soeharto pun tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini bisa dilihat dari dukungan presiden Soeharto untuk Indonesia mengikuti konferensi OKI pertama kalinya tahun 1969 sebagai upaya diplomasi konferensi. Selain itu, dukungan Indonesia dibawah pemerintahan presiden Soeharto juga terekam dalam pertemuan Hari Solidaritas Internasional bersama Masyarakat Palestina yang diadakan di PBB sejak 1978, setiap 29 November. Pada peringatan Hari Solidaritas Internasional bersama Masyarakat Palestina tahun 1986, dalam pidato tertulis yang dibacakan Kepala Perwakilan RI di PBB Nana Sutresna, presiden Soeharto menyatakan rakyat Palestina yang merdeka dan berdaulat sebelum 1967 merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian damai di Timur Tengah. Presiden Soeharto menekankan, tiap penyelesaian harus ditandai dengan

penarikan mundur pasukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang direbut tahun 1967, termasuk Yerusalem di mana ini merupakan wujud dari pelaksanaan diplomasi konferensi. Ketika terjadi perang enam hari antara Israel dengan Suriah, Mesir, dan Yordania. Di akhir perang, Israel berhasil menguasai Jalur Gaza, Tepi Barat, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan. Namun, tampaknya sikap presiden Soeharto terhadap Palestina terkesan mendua. Secara diam-diam, pada 1980-an militer Indonesia pernah bekerja sama dengan Israel melalui operasi rahasia bersandi Operasi Alpha.<sup>46</sup>

Operasi ini dirancang Benny Moerdani, yang ketika itu menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis ABRI. Menurut F. Djoko Poerwoko yang ketika itu ikut dalam operasi rahasia tersebut-dalam bukunya *Menari di Angkasa* (2007) pada 4 Mei 1980 paket pesawat jet A-4 Skyhawk gelombang pertama, terdiri dua pesawat *single seater* dan dua *double seater* tiba di Tanjung Priok, Jakarta, usai diangkut dengan kapal laut dari Israel. Setelah itu, gelombang berikutnya didatangkan setiap lima minggu. Angkatan Udara berhasil mendatangkan 32 pesawat A-4 Skyhawk pada September 1980. Operasi Alpha merupakan operasi klandestin terbesar yang pernah dilakukan Angkatan Udara Indonesia. Tanpa pernah terlacak, Indonesia berhasil mendatangkan pesawat jet dari sebuah negara yang sama sekali tidak memiliki hubungan diplomatik. Operasi tersebut sengaja dibuat senyap agar tak terjadi

---

<sup>46</sup> Yudistira Amran, Dari era Soekarno hingga Jokowi ini sikap Presiden RI soal Perjuangan Palestina, *Kumparan.com*, 20 Mei 2021, <https://kumparan.com/>

polemik di masyarakat bahwa Indonesia juga ‘main belakang’ dengan Israel.<sup>47</sup>

Lewat kunjungan diam-diam pula, pada 1993 Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin mengunjungi Jakarta. Pertemuan dengan presiden Soeharto berlangsung singkat, hanya sejam di kediaman pribadi presiden Soeharto. Dalam pertemuan singkat itu, Rabin mengisahkan proses perdamaian Israel dan *Palestine Liberation Organization* (PLO). Ketika Rabin menyinggung hubungan diplomatik dengan Indonesia, presiden Soeharto menjawab akan melihat perkembangan terlebih dahulu. Tampaknya, Israel di bawah Rabin sudah tak sabar mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pada 21 Oktober 1995 ketika presiden Soeharto menghadiri peringatan 50 tahun PBB di New York, Rabin secara khusus mendatangi hotel tempat presiden Soeharto menginap. Dalam pertemuan itu, Rabin menjelaskan perkembangan terakhir proses perdamaian Israel-Palestina. Akan tetapi, keinginan Rabin berhubungan baik dengan Indonesia tak pernah terwujud. Sikap Rabin yang melunak harus dibayar mahal dengan nyawanya. Rabin tewas diberondong peluru esktrimis sayap kanan Israel, Yogal Amir, dalam sebuah pawai di Tel Aviv.<sup>48</sup>

Ketidakjelasan hubungan antar kedua negara juga berlanjut pasca turunnya presiden Soeharto dari kursi jabatan yang digantikan oleh

---

<sup>47</sup> Ronen Zvulun, Riwayat Hubungan RI-Israel: Ada yang Terselubung dan Penuh Rayuan, *kumparannews*, 24 Desember 2021, <https://kumparan.com/>

<sup>48</sup> Fandi Hutari, Solidaritas Sukarno Terhadap Palestina dan sikap Mendua Orde Baru, *Alinea.id*, 20 Mei 2021, <https://www.alinea.id/>

presiden Prof. Dr.-Ing. Ir. H. Bacharuddin Jusuf Habibie. Pada masa Presiden Habibie, jabatan presiden dipegang dalam waktu yang paling singkat dibanding presiden lainnya. Dalam masalah internasional saat itu, Indonesia masih sibuk dalam menangani persoalan Timor Timur sehingga tidak memfokuskan kebijakan kepada isu internasional. Tidak banyak catatan hubungan presiden Habibie dengan Palestina karena jabatannya yang seumur jagung. Namun ketika ia meninggal pada 2019, ratusan Muslim di Palestina melakukan salat ghaib untuknya.<sup>49</sup>

Setelah kepemimpinan presiden Habibie, ia digantikan oleh presiden Dr. (H.C.). K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada masa pemerintahannya, hubungan antara Indonesia-Palestina semakin berkurang. Hal ini bisa dilihat dari sehari setelah pembentukan kabinetnya, presiden Gus Dur mencengangkan banyak pihak dengan membuka hubungan kerjasama dengan Israel, khususnya pada bidang perdagangan. Namun keinginan tersebut mendapat banyak penolakan dari para anggota dewan dan rakyat Indonesia. Hal yang direncanakan presiden Gus Dur tersebut sangat bertolak belakang dengan upaya yang dilakukan para presiden dahulu RI yang telah membela Palestina dalam kanvas internasional, termasuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden Gus Dur berdalih bahwa penting untuk membuka hubungan kerjasama dengan Israel agar bisa mengajak negara tersebut untuk berunding satu meja dengan Palestina. Dengan demikian,

---

<sup>49</sup> Abdillah Onim, Umat Islam Palestina Gaza shalat Gaib Hormati BJ Habibie, *antaranews.com*, 15 September 2019, <https://kaltim.antaranews.com/>

dapat di simpulkan bahwa presiden Gus Dur setuju dengan hubungan interaktif antara Indonesia dan Israel, namun tidak dalam hubungan diplomatik antar kedua negara. Gus Dur menganggap hal tersebut bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia serta sebagai media untuk terlibat penuh dan aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian Israel dan Palestina. Gus Dur menganggap selama ini titik temu terkait konflik tidak ada karena keduanya tidak mau berunding satu meja. Namun, niat presiden Gus Dur tidak terlaksana karena kuatnya tekanan dari dalam negeri yang tidak menyetujui idenya. Presiden Gus Dur sendiri diketahui pernah mengunjungi Palestina dan Israel sebagai tanda ingin membantu menyelesaikan konflik diantara kedua negara dan presiden Gus Dur dalam menyikapi isu Palestina lebih dominan menggunakan diplomasi bilateral.<sup>50</sup>

Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh putri dari presiden Soekarno, yakni presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahannya, ia juga berupaya membantu dan membela Palestina dan Israel serta simpati atas konflik yang terjadi diantara kedua negara. Dalam setiap kesempatan, ia selalu menegaskan pentingnya mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini bisa dilihat pada keterangannya pasca dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 2017. Ia mengatakan bahwa negara anggota KAA memiliki hutang terhadap

---

<sup>50</sup> Munawir Azis, Gusdur dan Jalan Cinta untuk Diplomasi Israel-Palestina, *Kompas.com*, 6 Februari 2018, <https://nasional.kompas.com/>

kemerdekaan Palestina. Selain itu, presiden Megawati juga mengatakan hal yang sama pada saat mengikuti perayaan hari lahir Nahdatul Ulama (NU) pada tahun 2021. Jauh sebelumnya di tahun 2000, beliau juga menyatakan dukungannya kepada Palestina melalui media pers pasca agresi Israel yang menewaskan 25 orang rakyat Palestina.<sup>51</sup> Akan tetapi, dukungan tersebut nyatanya tercemari oleh kurang konsistennya presiden Megawati dalam membela Palestina karena pada masa pemerintahannya, ia lebih condong membuka hubungan kerjasama dengan AS, Jepang dan Australia yang merupakan musuh Palestina karena negara-negara tersebut selalu mendukung penuh Israel.<sup>52</sup>

Kepemimpinan selanjutnya kemudian dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa kepemimpinannya terdapat perubahan dukungan yang lebih sistemik dan terarah. Hal ini bisa dilihat dari upayanya dalam membantu kemerdekaan Palestina seperti keberhasilan pemerintahannya dalam memperjuangkan Palestina masuk Inter Parliementary Union (IPU). Kontribusi ini juga dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menyatakan bahwa Indonesia berhasil memperjuangkan Palestina masuk ke dalam keanggotaan uni parlemen sedunia atau disingkat IPU. Konferensi IPU di Jenewa, Swiss

---

<sup>51</sup> Muhammad Irham, Cerita Ketum PDIP Dukung Kemerdekaan Palestina, *Tribunnews*, 31 Januari 2021, <https://manado.tribunnews.com/>

<sup>52</sup> Dani Prabowo, Megawati sebut Kemerdekaan Palestina Utang Konferensi Asia Afrika, *Kompas.com*, 18 Maret 2017, <https://nasional.kompas.com/>



ditandai dengan keputusan penerimaan Palestina sebagai anggota penuh meskipun saat itu Palestina belum menjadi anggota PBB.<sup>53</sup>

Masa pemerintahan presiden SBY juga kembali meneguhkan posisi dan komitmen dalam mendukung Palestina di OKI. Hal tersebut dapat terlihat dari partisipasi Indonesia pada KTT OKI ke 3 yang dilaksanakan di Makkah tahun 2005 dengan hasil pertemuan yaitu memberikan bantuan pada otoritas Palestina dalam mengatur wilayahnya dan menghimbau agar seluruh masyarakat Muslim di dunia menyumbang US\$ 1 per orang kepada Al Quds Fund untuk memelihara kelestarian masjidil Aqsa dan mencegah Yahudinisasi di wilayah tersebut. Pemerintahan presiden SBY juga memberikan bantuan ekonomi senilai US\$ 1 juta untuk mengurangi krisis kemanusiaan di Palestina tahun 2008.<sup>54</sup>

Presiden SBY juga memberikan dukungan kepada Palestina melalui pertemuan KTT OKI, bertepatan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-66 yang digelar di New York, yang membahas penyelesaian isu Palestina dan Israel. Disela-sela proses sidang, pertemuan OKI diselenggarakan dan Indonesia dibawah kepemimpinan SBY mengajak negara-negara OKI dan masyarakat internasional untuk mendukung Palestina masuk sebagai anggota PBB ke- 194. Pada 28 September 2012 pertemuan yang sama kembali di gelar di Markas PBB, New York, dan

---

<sup>53</sup> Universitas Pelita Harapan, DPR RI Berbagi pentingnya Diplomasi Parlemen Kepada Mahasiswa FISIP UPH, *UPH Education*, 21 Januari 2019, <https://www.uph.edu/>

<sup>54</sup> Sabrina Asril, Pemerintah Indonesia Salurkan 1 Juta dolar Untuk Rakyat Palestina, *Kompas.com*, 11 Juli 2014, <https://nasional.kompas.com/>

Indonesia kembali mengajak anggota OKI untuk serius memperjuangkan peningkatan status Palestina di PBB.

Pada tahun 2007-2008 Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia selalu mendorong agar DK PBB mengeluarkan keputusan terkait masalah Palestina, termasuk dalam bentuk *presidential statement* (PRST) maupun resolusi. Hal ini disebabkan karena DK PBB adalah Lembaga yang berwenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Kemudian adanya peran Indonesia yang tergabung dalam kerja sama regional *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP). Indonesia telah menggagas NAASP *Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine*, di Jakarta, tanggal 14-15 Juli 2008. Indonesia menyampaikan komitmen untuk mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, bukan saja secara politis melainkan juga melalui kerja sama teknis berupa pembangunan kapasitas bagi 1000 warga Palestina.<sup>55</sup>

Program ini telah berjalan sejak 2008 hingga 2013. Adanya bantuan Finansial dan Pembangunan Rumah Sakit di Gaza.<sup>56</sup> Indonesia juga telah menyampaikan bantuan finansial terhadap Palestina, termasuk dalam bentuk pledge pada Paris Donor Conference 2007 dan selama Krisis Gaza 2008-2009, yang masing-masing berjumlah USD 1 Juta. Selain itu, KBRI Kairo telah menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk

---

<sup>55</sup> Kementrian Sekretariat Negara RI, Dihadiri PM Palestina Presiden Buka New Asean African strategic Partnership, *Setneg.go.id*, 14 Juli 2008, <https://www.setneg.go.id/>

<sup>56</sup> Lini Farokah, 10 Fakta Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza Palestina, *Jatimnetwork*, 11 Oktober 2022, <https://bondowoso.jatimnetwork.com/>

rakyat Palestina di Jalur Gaza Januari 2011, berupa peralatan medis senilai USD 83.325,21 yang berasal dari Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA). Indonesia juga mengalokasikan dana sejumlah Rp 20 Miliar untuk membangun Indonesia Cardiac Center di Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza. Melalui Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) lembaga kemanusiaan berbasis di Jakarta, rakyat Indonesia mendirikan Rumah Sakit Indonesia di atas tanah wakaf pemerintah Palestina. Bisa dilihat bahwa SBY dalam menyikapi isu Palestina banyak menggunakan diplomasi konferensi melalui lembaga internasional seperti PBB, OKI, NAASP dan lainnya.<sup>57</sup>

#### **4.3.2 Peran Presiden Joko Widodo Melalui OKI Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina**

Pada penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa setiap pemimpin Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Meskipun begitu, setiap pemimpin Indonesia dapat dikatakan konsisten mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, dan mayoritas sikap dan peran yang ditempuh berbentuk dukungan politis dan pemberian bantuan kemanusiaan. Termasuk juga dalam hal ini pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan dukungan dalam setiap perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam beberapa kali kesempatan, presiden Jokowi kerap memberikan dukungan pada Palestina. Bahkan, dalam

---

<sup>57</sup> Hendra Maujana Saragih, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Palestina Sebagai Negara Merdeka Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3 no.2, (2018), pp. 145-146

janji kampanye saat Pemilihan Presiden 2014, ia menegaskan akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Setelah menjabat, presiden Jokowi juga tetap mengupayakan kemerdekaan palestina. Hal ini tersebut dibuktikan pada saat KTT Luar Biasa OKI di Istanbul Turki, presiden Jokowi mengatakan “Dalam setiap helaan nafas diplomasi Indonesia, disitu terdapat keberpihakan terhadap Palestina”. Konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina juga terlihat dari respon Indonesia terhadap kebijakan presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump yang memberikan pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Dalam pidatonya di Diplomatic Reception Room, Gedung Putih, presiden Trump menegaskan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan Kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini pun menambah daftar panjang penderitaan Palestina pada akhirnya. Pada Kamis 7 Desember 2017 di Istana Bogor Presiden Indonesia Joko Widodo pun mengecam keras sikap Trump tersebut dan meminta Amerika Serikat agar mempertimbangkan kembali keputusan sepihak tersebut meski tidak digubris sama sekali oleh Trump. Sikap Indonesia ini juga kompak dengan negara-negara anggota OKI yang menentang keras kebijakan Trump tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Rehia Sebayang, Pidato Perdana di PBB Jokowi Tegaskan RI Pro Palestina, *CNBC Indonesia*, 23 September 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200923084117-4-188742/pidato-perdana-di-pbb-jokowi-tegaskan-ri-pro-palestina>

Indonesia juga menjadi tuan rumah pelaksanaan KTT luar biasa OKI di Jakarta pada 6-7 Maret 2016. Indonesia menjadi tuan rumah *International Conference on the question of Jerusalem*. Indonesia aktif dalam *Peace Conference* yang diinisiasi oleh Perancis. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi, KTT Luar Biasa OKI ini diadakan sebagai bentuk nyata upaya negara-negara OKI untuk mendorong penyelesaian konflik di Palestina. Situasi di Palestina semakin hari semakin memburuk. Hal ini utamanya terkait status kota Al Quds (Yerusalem) yang diokupasi oleh Israel. Presiden Jokowi menjelaskan akan mendukung penuh perjuangan Palestina dan upaya kemerdekaan negara Palestina dengan cara-cara damai dan demokratis serta menghindari penggunaan kekerasan, sebab menurut Presiden Jokowi, kekerasan akan melahirkan kekerasan yang lebih besar pula. Pertemuan KTT ini dihadiri oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Sudan Omar Hassan Ahmed Al-Bashir, Pangeran Yordania Pangeran Husein Bin Talal, Wakil Presiden Gambia Isatou Njie-Saidy, PM Libya Fayyees al-Sarraj, dan Sekjen OKI Iyad Ameen Madani. Palestina telah diakui oleh 137 negara dan berhasil menjadi negara peninjau PBB. Keberhasilan ini merupakan keberhasilan dari kolaborasi komunitas internasional, termasuk Indonesia.<sup>59</sup>

Selain itu, dalam KTT luar biasa OKI di Istanbul Turki tahun 2017, Indonesia melalui presiden Jokowi mengeluarkan 6 usulan tegas

---

<sup>59</sup> Asih Kusumaningsih, 8 Peran Indonesia dalam OKI, *sejarahlengkap.com*, 20 Agustus 2018, <https://sejarahlengkap.com/indonesia/peran-indonesia-dalam-oki>

dalam merespon hal tersebut, ke-enam usulan tersebut antara lain; pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan bilateral dari Amerika Serikat terkait Yerusalem tersebut dan menegaskan bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu kota Palestina. Kedua, semua negara yang memiliki kedutaan di Tel Aviv tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat. Ketiga, negara anggota OKI diminta untuk menjadi motor penggerak dukungan negara-negara lain yang belum mengakui untuk dapat mengakui Palestina, Keempat, negara anggota OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebaiknya segera mengambil langkah diplomatik sesuai dengan resolusi OKI. Kelima, negara-negara OKI diminta untuk mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas dan kerjasama ekonomi dengan Palestina. Keenam, OKI harus mampu menjadi motor pergerakan di berbagai forum internasional atau multilateral untuk membantu Palestina. Dengan demikian, dalam setiap pertemuan OKI, Indonesia selalu memberikan dukungan kepada Palestina yang dalam hal ini utamanya yaitu dukungan moril dan diplomasi.<sup>60</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa presiden Jokowi mengecam tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mengajak negara anggota yang tergabung kedalam OKI untuk mengaplikasikan ke-enam usulan tersebut. Pemerintah Indonesia mendorong agar seluruh negara anggota OKI segera mengadakan sidang

---

<sup>60</sup> Raudatul Jannah, 6 Poin Pernyataan Jokowi Soal Palestina, *Redaksi Indonesia*, 16 Desember 2017, <https://redaksiindonesia.com/read/6-poin-pernyataan-jokowi-soal-palestina-html>

khusus untuk menangani masalah ini. Selain dukungan pemerintah, peran masyarakat Indonesia sendiri merupakan hal yang sangat besar bagi terjalinnya hubungan yang erat antara Indonesia dan Palestina, hal tersebut tidak terlepas dari cerminan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menghormati kebebasan kemerdekaan bangsa dan manusia seperti pada sila ke 2 pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>61</sup>

Salah satu kemajuan signifikan peran OKI, terutama Indonesia di masa pemerintahan presiden Jokowi dalam proses menuju kemerdekaan yang hakiki bagi Palestina adalah diakuinya Palestina sebagai salah satu negara anggota PBB melalui resolusi sidang umum PBB di New York pada tanggal 10 September 2015. Dalam hal ini, Palestina diberikan kehormatan untuk mengibarkan benderanya di markas PBB. Dengan dukungan 119 suara, 45 suara abstain dan 8 suara menolak, bendera Palestina akhirnya bisa berkibar untuk pertama kalinya. Hal ini juga disebabkan karena citra Indonesia yang baik di mata dunia internasional dan rekam jejak Indonesia sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang dapat menghimpun dukungan bagi Palestina di PBB. Indonesia sebagai negara anggota OKI menyerukan dunia internasional, termasuk negara anggota OKI untuk mendukung Palestina. Seluruh negara anggota OKI kemudian memberikan dukungannya kepada Palestina serta menghimpun suara dari negara

---

<sup>61</sup> Hendra Maujana Saragih, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Palestina Sebagai Negara Merdeka Pada Masa Pemerintahan Jokowi, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*3 no.2 (2018), pp.51-52 <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/601>

lainnya untuk mendukung Palestina. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia sebagai anggota OKI menjadikan organisasi tersebut sebagai wadah untuk mengekspresikan politik luar negeri dan diplomasinya terutama untuk Palestina.<sup>62</sup>

Jika diperhatikan, tindakan dan upaya pemerintahan presiden SBY dalam membantu memperjuangkan kemerdekaan Palestina hampir serupa dengan pemerintahan presiden Jokowi. Keduanya sama-sama aktif membantu Palestina melalui OKI sebagai upaya mengadakan diplomasi konferensi. Keduanya juga aktif dalam memberikan bantuan kepada Palestina yang berada di luar kegiatan OKI. Perbedaan antara pemerintahan presiden SBY dan presiden Jokowi dalam memperjuangkan Palestina melalui OKI terletak pada poin-poin yang dibahas dalam setiap pertemuan OKI. Poin tersebut seperti memberikan bantuan pada otoritas Palestina dalam mengatur wilayahnya dan menghimbau agar seluruh masyarakat Muslim di dunia menyumbang US\$ 1 per orang kepada Al Quds Fund untuk memelihara kelestarian masjidil Aqsa dan mencegah Yahudinisasi di wilayah tersebut. Poin lainnya yaitu meningkatkan solidaritas Islam dan kerjasama dengan masyarakat internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel. Adapun pada masa presiden Jokowi, upaya yang diajukan dalam OKI pada saat KTT Luar Biasa OKI di mana ia mengajukan 6 poin sebagaimana

---

<sup>62</sup> Muhammad Sahlan, Update Hasil Voting PBB 128 Negara Mendukung Palestina 9 Negara Menolak dan 35 Abstain, *Moslem Today*, 22 Desember 2017, <http://www.moslemtoday.com/update-hasil-voting-pbb-128-negara-mendukung-palestina-9-negara-menolak-35-negara-abstain/>



seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa perbedaan poin-poin yang diajukan dalam pertemuan OKI oleh keduanya disebabkan karena kasus dan isu terkait Palestina yang terjadi pada masa pemerintahan keduanya yang juga berbeda.<sup>63</sup>

Secara ringkas, setiap pemimpin Indonesia memiliki caranya sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Peran yang lebih dominan oleh para pemimpin Indonesia dalam menanggapi dukungan kepada Palestina lebih banyak berupa dukungan diplomatis seperti pernyataan secara resmi melalui berbagai kegiatan kenegaraan. Hal ini bisa dilihat dari seluruh pemimpin Indonesia yang melakukan tindakan sama berupa pemberian dukungan diplomatis maupun moril dalam berbagai kesempatan untuk menyatakan bahwa Indonesia selalu mendukung Palestina. Selain dukungan diplomatis dan moril, beberapa para pemimpin Indonesia seperti presiden SBY dan presiden Jokowi juga menggunakan dukungan materil berupa bantuan dana kemanusiaan, bahkan keduanya juga aktif dalam membantu *capacity building* bagi rakyat Palestina seperti memberikan beasiswa pendidikan serta membangun rumah sakit dan sekolah.

Baik presiden SBY dan presiden Jokowi juga dikenal aktif melalui OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Keduanya cenderung menempuh langkah yang sama, misalnya memperjuangkan

---

<sup>63</sup> Rehia Sebayang, Pidato Perdana di PBB Jokowi Tegaskan RI Pro Palestina, *CNBC Indonesia*, 23 September 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200923084117-4-188742/pidato-perdana-di-pbb-jokowi-tegaskan-ri-pro-palestina>

keanggotaan penuh PBB bagi Palestina yang sudah dimulai sejak masa pemerintahan SBY dan dilanjutkan oleh presiden Jokowi yang mana ini juga menjadi agenda seluruh anggota OKI dalam membantu kemerdekaan Palestina. Baik presiden SBY dan presiden Jokowi terlibat aktif dalam partisipasi Indonesia pada setiap kegiatan KTT luar biasa OKI, keduanya juga mengusulkan poin-poin terkait Palestina pada setiap pertemuan OKI. Presiden Jokowi dalam hal ini lebih berupaya melanjutkan berbagai kebijakan yang sudah diupayakan oleh presiden SBY di OKI.

Dalam hal ini, merujuk pada berbagai bentuk diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui OKI oleh presiden Jokowi, terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi dukungan Indonesia untuk Palestina, diantaranya: pertama, Anti kolonialisme. Sesuai dengan amanat konstitusi yakni pembukaan UUD 1945 Indonesia merupakan negara yang menolak adanya penguasaan negara terhadap negara lain. Palestina sebagai sebuah negara yang telah memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1988 telah mendapat pengakuan dari Indonesia. Palestina sebagai negara berhak untuk memiliki pemerintahan yang berdaulat bebas dari campur tangan bangsa lain. Namun pada faktanya Israel yang menjajah tanah Palestina membuat Palestina belum dapat menikmati kedaulatannya secara penuh.

Kedua, Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan 82.5% nya merupakan muslim yang menjadikan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Palestina sebagai bagian dari tanah Arab yang merupakan daerah di mana agama Islam berasal, memiliki keterikatan yang kuat dengan Islam itu sendiri, sehingga masyarakat Indonesia memiliki simpati yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal ini juga mengarah pada stabilitas politik dalam Negeri. Konflik Palestina merupakan konflik yang menarik perhatian masyarakat internasional terutama muslim, termasuk di Indonesia. Isu ini dapat dikategorikan ke dalam arena konstituen, yang artinya pemerintah melihat bahwa isu ini dapat menjadi jalan untuk mendapat simpati publik, sehingga opini publik terkait isu ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan luar negeri.

Ketiga, terkait dengan kemanusiaan. Konflik antara Israel dan Palestina sering menyebabkan bencana kemanusiaan di wilayah ini akibat korban perang dan penjajahan Israel., perang sering kali terjadi dan jatuhnya korban jiwa tak dapat dihindarkan. Sejarah mencatat sejak Inggris menyatakan komitmennya untuk mendukung pendirian negara Israel di tanah Palestina bangsa Yahudi melakukan berbagai pengusiran, penyiksaan dan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Bahkan ada yang menyebut apa yang dilakukan Israel adalah tindakan genosida atau pembersihan etnis, karena Israel tidak pandang bulu dalam setiap serangannya yang banyak menewaskan warga sipil, baik itu wanita maupun anak-anak. Keempat, perdamaian dunia. Hari ini, banyak

sarjana dan politisi menganggap bahwa solusi dari masalah Palestina adalah satu-satunya kunci untuk perdamaian dan stabilitas internasional. Mendukung kemerdekaan Palestina dan menyelesaikan konflik ini merupakan langkah dalam mewujudkan perdamaian dunia. Agenda Utama Politik Luar Negeri, menurut M. Muttaqien konflik Arab-Israel merupakan isu penting bagi politik luar negeri Indonesia. Konflik ini merupakan konflik yang menarik perhatian publik internasional. Indonesia merupakan anggota aktif dari berbagai organisasi internasional seperti OKI, Gerakan Non Blok (GNB), New Asian African Strategic Partnership (NAASP) yang mana organisasi-organisasi tersebut memiliki perhatian khusus terhadap konflik Israel-Palestina. Sehingga penting bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya dalam upaya mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Pada akhirnya, segala upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui pemerintahan presiden Jokowi sejatinya merefleksikan kepentingan nasional itu sendiri. Kepentingan nasional bercirikan identitas yang dimiliki oleh negara tersebut, yang dalam hal ini identitas yang dimiliki Indonesia berupa UUD 1945 dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas berupa pembukaan UUD 1945 terkait penentangan terhadap segala penjajahan ini lahir dari pengalaman Indonesia sebagai bangsa yang pernah dijajah dan mengalami rasa sakit akibat penjajahan yang pernah dilakukan selama ratusan tahun.

Kepentingan lainnya menyangkut dukungan dan suara publik yang sangat berarti bagi presiden Jokowi. Sangat berbahaya baginya jika melawan arus dalam menyikapi isu Palestina, yang mana hal ini akan berpengaruh pada kepercayaan publik mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki kedekatan emosional dengan Palestina yang mengalami kejahatan kemanusiaan oleh Israel. Hal tersebut bisa dilihat bahkan pada kampanye presiden Jokowi tahun 2014 di mana ia berjanji akan terus mengupayakan kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut mengindikasikan bahwa suara publik sangat berpengaruh terhadap segala keputusan yang ia buat dalam menyikapi isu Palestina, dan hal ini demi stabilitas pemerintahan yang ia jalankan karena suara publik sangat berarti.

Hasil dari upaya pemenuhan kepentingan nasional tersebut adalah berbagi peran Indonesia melalui OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Selama ini tidak banyak yang mengulas terkait apa saja peran Indonesia di masa pemerintahan Jokowi di OKI dalam menyikapi isu Palestina. Padahal, membahas upaya Indonesia melalui OKI menjadi perspektif yang penting karena OKI sendiri adalah wujud persatuan, kesatuan dan kerjasama negara-negara mayoritas Muslim di dunia sehingga melihat keterlibatan Indonesia dalam organisasi tersebut menjadi kajian yang menarik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setiap pemimpin Indonesia juga memiliki caranya sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Peran yang lebih dominan oleh para pemimpin Indonesia dalam menanggapi dukungan kepada Palestina lebih banyak berupa dukungan diplomatis seperti pernyataan secara resmi melalui berbagai kegiatan kenegaraan. Hal ini bisa dilihat dari seluruh pemimpin Indonesia yang melakukan tindakan sama berupa pemberian dukungan diplomatis maupun moril dalam berbagai kesempatan untuk menyatakan bahwa Indonesia selalu mendukung Palestina. Selain dukungan diplomatis dan moril, beberapa para pemimpin Indonesia seperti presiden SBY dan presiden Jokowi juga menggunakan dukungan materil berupa bantuan dana kemanusiaan, bahkan keduanya juga aktif dalam membantu *capacity building* bagi rakyat Palestina seperti memberikan beasiswa pendidikan serta membangun rumah sakit dan sekolah.

Baik presiden SBY dan presiden Jokowi juga dikenal aktif melalui OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Keduanya cenderung menempuh langkah yang sama, misalnya memperjuangkan keanggotaan penuh PBB bagi Palestina yang sudah dimulai sejak masa pemerintahan SBY dan dilanjutkan oleh presiden Jokowi yang mana ini juga menjadi agenda seluruh anggota OKI dalam membantu kemerdekaan Palestina. Baik presiden SBY dan presiden Jokowi terlibat aktif dalam partisipasi Indonesia pada setiap

kegiatan KTT luar biasa OKI, keduanya juga mengusulkan poin-poin terkait Palestina pada setiap pertemuan OKI. Terdapat perbedaan poin yang diajukan oleh keduanya, misalnya presiden SBY mengajukan pemberian bantuan otoritas Palestina dalam mengatur wilayahnya, meningkatkan solidaritas Islam dan menghimbau masyarakat Muslim seluruh dunia dapat menyumbang sekurang-kurang US\$ 1 per orang kepada Al-Quds Fund untuk memelihara kelestarian Masjidil Aqsa dan mencegah Yahudinisasi di wilayah tersebut. Sedangkan presiden Jokowi memiliki poin-poin seperti menolak pengakuan sepihak Trump terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel, tidak memindahkan kedutaan besar di Tel Aviv, menggerakkan dukungan bagi negara yang belum mengakui Palestina, menyerukan setiap negara untuk meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Israel, meningkatkan bantuan kemanusiaan dan memberikan dukungan Palestina di PBB. Perlu diketahui bahwa perbedaan poin-poin yang diajukan dalam pertemuan OKI oleh keduanya disebabkan karena kasus dan isu terkait Palestina yang terjadi pada masa pemerintahan keduanya yang juga berbeda.

Adapun peran Indonesia di masa pemerintahan presiden Jokowi melalui OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina yaitu Mengeluarkan 6 usulan tegas dalam merespon pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem melalui KTT yang diselenggarakan di Turki, diplomasi Indonesia melalui OKI juga berhasil mendorong Palestina untuk mengibatkan benderanya di markas besar PBB untuk pertama kalinya sehingga disinyalir dapat membuka kesempatan negara tersebut untuk menjadi anggota penuh

PBB serta sebagai tuan rumah KTT Luar Biasa OKI di Jakarta tanggal 6-7  
Maret 2016.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asrudin, M. Maliki & M.J. Suryana (ed.). *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional*. Malang: Intrans Publishing. 2014
- U. S. Bakry. *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- M. Moas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. 1990
- Salim Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media. 1990
- Mashood Baderin. *Hukum Internasional HAM dan hukum Islam*. Jakarta: Komnas HAM RI. 2007
- Syahrums, Salim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media. 2016
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Press. 2008
- Sutopo, Hadi Ariesto. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana. 2010

### Jurnal

- Khadijah Binti Abdul Munir, Respon Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Israel Atas Palestina, p.13 (*Undergraduated Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016). <https://www.undergraduatedthesisuin.khadijah.pdf>
- Nathan Witkin. A Two state/One Land Solution for The Israeli-Palestinian Conflict. *Middle East Journal* Vol.65 No.1 (2020) pp.313-315. <https://www.middleeastjournal.com>

- Muhammad Hafiz, *Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim*, *Al-Ahkam: Journal Pemikiran Hukum Islam* vol. 23 No.2 (2013) pp.141-142.
- Mardenis. Revitalisasi Peran OKI Untuk Mewujudkan Negara Palestina Merdeka, *MMH* Vol.4 No.2 (2021) pp.61-62.
- Muh. Novan Prasetya. Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina, *JurnalPir* Vol.2 No.2 (2018) pp.31-32.
- Cantika Niscala Putri. Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Penguatan Diplomasi Islam, *Jurnal Sosial Politik* Vol.8 No.1 (2022) pp.67-69.
- Dewa Gede Sudika Mangku. *Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Dalam Perspektif ASEAN*. Media Komunikasi FIS Vol.2 No.2 (2013) pp.26-28.
- M. Angela Merici Siba. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya. *Islamic World and Politic* Vol.2 No.2 (2018) pp.30-31.
- Azhari Setiawan. Asean Political Security Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance Dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara. *Integritas* Vol.2 No.1 (2016) pp.24-27
- Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan dan Aspek Historis dan Yuridis, *Jurnal Undip3* No.2, (2021) pp.38-40 [www.jurnalundip.ac.id](http://www.jurnalundip.ac.id)
- Misri A. Muchsin, Palestina dan Israel: Sejarah Konflik dan Masa Depan, *Jurnal Ilmu Keislaman*39 No.2 (2015) pp.73-75 [jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id](http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id)
- Hendra Maujana Saragih, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Palestina Sebagai Negara Merdeka Pada Masa Pemerintahan Jokowi, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*3 No.2 (2018), pp.51-52 <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/601>

## Web

- Tito Helmawan Reditya, 17 september Dalam Sejarah: Kesepakatan Camp David Ditekan Pada 1978, *Kompas.com*, 17 september 2021, <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/17/150733770/17-september-dalam-sejarah-kesepakatan-camp-david-ditekan-pada-1978>

- Akhmad Farhan, Peran Palestina dalam Kemerdekaan Indonesia, *Retizen Republika*, 26 Mei 2021, <https://retizen.republika.co.id/posts/11339/peran-palestina-dalam-kemerdekaan-indonesia>
- Rehia Sebayang, Pidato Perdana di PBB Jokowi Tegaskan RI Pro Palestina, *CNBC Indonesia*, 23 September 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200923084117-4-188742/pidato-perdana-di-pbb-jokowi-tegaskan-ri-pro-palestina>
- Asih Kusumaningsih, 8 Peran Indonesia dalam OKI, *sejarahlengkap.com*, 20 Agustus 2018, <https://sejarahlengkap.com/indonesia/peran-indonesia-dalam-oki>
- Raudatul Jannah, 6 Poin Pernyataan Jokowi Soal Palestina, *Redaksi Indonesia*, 16 Desember 2017, <https://redaksiindonesia.com/read/6-poin-pernyataan-jokowi-soal-palestina-html>
- Muhammad Sahlan, Update Hasil Voting PBB 128 Negara Mendukung Palestina 9 Negara Menolak dan 35 Abstain, *Moslem Today*, 22 Desember 2017, <http://www.moslemtoday.com/update-hasil-voting-pbb-128-negara-mendukung-palestina-9-negara-menolak-35-negara-abstain/>
- Qholidia, Deklarasi Universal HAM: Sejarah dan Isi Pasal, *Detik.com*, 12 Oktober 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5763438/deklarasi-universal-ham--sejarah-dan-isi-pasal>
- Wirahmi, Ajeng, Sejarah Perang 6 Hari yang Dimenangkan Israel, *sindonews*, 12 September 2022, <https://international.sindonews.com/read/883053/43/sejarah-perang-6-hari-yang-dimenangkan-israel-1662973791>
- Adi Saputra, Sejarah Terbentuknya OKI, *CNN Indonesia*, 21 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210623160237-125-658417/sejarah-berdirinya-oki-organisasi-kerja-sama-islam>
- Nibras Nada, Organisasi Kerjasama Islam (OKI): Sejarah, Tujuan dan Anggota, *kompas.com*, 17 Februari 2020, <https://www.kompas.com>